

**STRATEGI SINKRONISASI ENERGI NEGARA BALTIK UNTUK  
MENGURANGI KETERGANTUNGAN PADA RUSIA TAHUN 2022–2024**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Disusun Oleh:

**TECTONA ALDIN DANA SAPUTRA**

21323173

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**STRATEGI SINKRONISASI ENERGI NEGARA BALTIK UNTUK  
MENGURANGI KETERGANTUNGAN PADA RUSIA TAHUN 2022–2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

**TECTONA ALDIN DANA SAPUTRA**

21323173

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STRATEGI SINKRONISASI ENERGI NEGARA BALTIK UNTUK  
MENGURANGI KETERGANTUNGAN PADA RUSIA TAHUN 2022-  
2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Dewi Masitoh, S.Hub.Int., M.Sos.
- 3 Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.
- 4 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

*Karina*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 02 Oktober 2025



---

Tectona Aldin Dana Saputra

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian .....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara .....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian .....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	14
1.8.4 Proses Penelitian .....	14
1.9 Sistematika Pembahasan .....	15
BAB 2 INTERDEPENDENSI ASIMETRIS NEGARA-NEGARA BALTIK TERHADAP RUSIA.....	16
2.1 Warisan Struktural: Sejarah dan Infrastruktur Energi Bersama Rusia 17	
2.1.1 Sejarah Ketergantungan .....	17
2.1.2 Gas Alam.....	20
2.1.3 Listrik .....	22
2.2 Politisasi Energi Pada Kerentanan sebagai Senjata Geopolitik .....	25
BAB 3 SINKRONISASI ENERGI NEGARA-NEGARA BALTIK DENGAN JARINGAN EROPA: ANALISIS STRATEGIS MELALUI PENDEKATAN COMPLEX INTERDEPENDENCE.....	30
3.1 <i>Multiple Channels</i> .....	31
3.1.1 Saluran Interstate .....	32
3.1.2 Saluran Transgovernmental .....	36
3.1.3 Saluran Transnational.....	38
3.2 <i>Absence of Hierarchy Among Issues</i> .....	45
3.3 <i>Minor Role of Military Force</i> .....	51
BAB 4 PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Rekomendasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakter Teori <i>Complex Interdependence</i> .....	10
Tabel 2. Proyek Infrastruktur Sinkronisasi Tahun 2022 .....	41
Tabel 3. Tingkat Inflasi Tahunan Negara Baltik Tahun 2022-2024 .....	47
Tabel 4. Analisis Interdependensi Kompleks Negara Baltik dengan Eropa .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Interkoneksi Sistem Tenaga Listrik di Wilayah Baltik Tahun 2014...	18
Gambar 2. Jalur Pipa Gas Utama Bekas Uni Soviet Tahun 2014.....	21
Gambar 3. Cincin Energi Sistem UPS/IPS BRELL.....	23

## DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
AST	: <i>Augstsprieguma Tikls AS</i>
BEMIP	: <i>Baltic Energy Market Interconnection Plan</i>
BRELL	: Belarus, Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania
CEF	: <i>Connecting Europe Facility</i>
CEN	: <i>Continental Europe Network</i>
ECB	: <i>European Central Bank</i>
EBRD	: <i>European Bank for Reconstruction and Development</i>
EIB	: <i>European Investment Bank</i>
ENTSO-E	: <i>European Network of Transmission System Operators for Electricity</i>
ENTSO-G	: <i>European Network of Transmission System Operators for Gas</i>
FSRU	: <i>Floating Storage Regasification Unit</i>
GW	: <i>Gigawatt</i>
HVDC	: <i>High Voltage Direct Current</i>
Hz	: <i>Hertz</i>
IPS	: <i>Integrated Power System</i>
kV	: <i>KiloVolt</i>
LNG	: <i>Liquefied Natural Gas</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MW	: <i>MegaWatt</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
PCI	: <i>Project of Common Interest</i>
PKN Orlen	: <i>Polskie Koncern Naftowy Orlen</i>
PLTN	: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PSE	: <i>Polskie Sieci Elektroenergetyczne</i>
TSO	: <i>Transmission System Operator</i>
UE	: Uni Eropa
UPS	: <i>Unified Power System</i>

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi sinkronisasi energi negara-negara Baltik dengan Eropa pada tahun 2022-2024 yang diakselerasi oleh invasi Rusia ke Ukraina. Menggunakan kerangka interdependensi kompleks dari Keohane dan Nye, untuk membuktikan bahwa kondisi kerentanan (*vulnerability*) dan kepekaan (*sensitivity*) yang ekstrem menciptakan sebuah kewajiban bagi negara-negara Baltik untuk bertindak. Penelitian ini berargumen bahwa kondisi kerentanan energi terhadap Rusia menciptakan respon untuk segera bertindak. Temuan dalam menunjukkan sinkronisasi adalah strategi proaktif untuk menukar bentuk interdependensi yang asimetris menjadi bentuk lain yang lebih terdiversifikasi dan berbasis aturan bersama Eropa. Strategi tersebut dieksekusi dengan memanfaatkan *Multiple Channels* untuk memobilisasi sumber daya finansial, teknis, dan swasta mengelola *Absence of Hierarchy Among Issues* dengan menyeimbangkan pilar keamanan, ekonomi, teknis, dan lingkungan serta memilih arena institusional melalui *Minor Role of Military Force* untuk menghindari eskalasi. Temuan ini menjelaskan mekanisme di balik kebijakan luar negeri transformatif negara kecil dalam mengelola interdependensi.

**Kata-kata kunci:** Upaya Strategis, Interdependensi Kompleks, Keamanan Energi, Negara-Negara Baltik, Sinkronisasi Energi, Uni Eropa.

## ABSTRACT

*This study analyzes the Baltic states' energy synchronization strategies with Europe in 2022-2024, which were accelerated by Russia's invasion of Ukraine. Using Keohane and Nye's complex interdependence framework, it demonstrates that extreme vulnerability and sensitivity create an obligation for the Baltic states to act. This study argues that energy vulnerability to Russia created a response to act immediately. The findings show that synchronization is a proactive strategy to exchange an asymmetrical form of interdependence for a more diversified form based on common European rules. This strategy is executed by utilizing multiple channels to mobilize financial, technical, and private resources, managing the absence of hierarchy among issues by balancing the pillars of security, economy, technology, and the environment, and choosing institutional arenas through the minor role of military force to avoid escalation. These findings explain the mechanisms behind the transformative foreign policy of small countries in managing interdependence.*

**Keywords:** *Baltic States, Complex Interdependence, Energy Security, Energy Synchronization, European Union, Strategic Efforts.*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak runtuhnya era kejayaan Uni Soviet, negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, dan Lithuania) sangat bergantung pada pasokan listrik dan gas dari Rusia. Ketergantungan tersebut dikarenakan adanya perjanjian kerjasama energi antara negara-negara tersebut dengan Rusia yang membuat jaringan energi mereka terhubung. Dalam mengendalikan sebagian besar infrastruktur energi di wilayah tersebut, Rusia memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan energi dari negara-negara Baltik. Hal tersebut membuat Rusia dapat menggunakan pasokan energi sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan politik dari negara-negara tersebut. Perusahaan energi Rusia, seperti Gazprom menjadi salah satu perusahaan yang berpengaruh dalam pasokan gas alam dari Rusia ke negara-negara Baltik (Thomas 2021).

Negara-negara Baltik menggunakan sistem jaringan listrik yang menghubungkan Belarus, Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania atau biasa disebut sebagai sistem BRELL. Sistem tersebut sudah ada sejak era Uni Soviet dan berlangsung hingga saat ini. BRELL beroperasi sebagai sistem listrik yang saling terhubung (sinkron) dan dikendalikan oleh Rusia melalui jaringan *Integrated Power System* atau IPS serta *Unified Power System* atau UPS (Hodunova 2024). Namun, negara-negara Baltik berencana untuk desinkronisasi (Sebuah proses pemisahan teknis dan politis dari sistem kelistrikan) jaringan energi Rusia dan memilih mitra baru, yakni sinkronisasi (Penyelarasan frekuensi dan integrasi penuh ke dalam Jaringan) dengan Uni Eropa. Strategi tersebut didorong oleh adanya

pandemi COVID-19 dan aktivitas perang Rusia di Ukraina (Teivāns-Treinovskis dkk. 2023).

Melalui infrastruktur dan sejarah negara Baltik menciptakan sebuah ketergantungan antara Baltik dan Rusia, tingkat ketergantungan tersebut sangat signifikan dan bervariasi di antara ketiga negara, namun secara kolektif menunjukkan kerentanan yang besar. Sebelum upaya diversifikasi dan proyek sinkronisasi dilakukan, ketergantungan negara Baltik pada gas Rusia masih menyentuh angka 100% pada tahun 2014 (Bergmane 2020). Pada tahun 2020, Lithuania telah berhasil mengurangi ketergantungan gas dari Rusia menjadi 19% saja, Estonia walaupun hanya 6% total penggunaan gas impor akan tetapi 100% masih mengimpor gas dari Rusia, Latvia pun demikian, dari 24% total penggunaan energi gas, mereka masih mengimpor 100% gas mereka dari Rusia, karena memang energi utama Estonia dan Latvia adalah *hydropower dan oil shale* (Bergmane 2020). Ketergantungan energi negara Baltik memang bervariasi dan tidak sama, akan tetapi mereka secara kolektif sadar bahwa ketergantungan tersebut menciptakan kerentanan untuk mereka dan bisa dijadikan alat pengaruh politik oleh Rusia.

Selama dua dekade terakhir, negara-negara Baltik telah berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi yang menjadikan Rusia dapat mengeksploitasi ranah energi menjadi alat pengaruh politik. Di sektor gas, langkah tersebut di antaranya, yakni pembangunan infrastruktur terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG) di Lithuania dan proyek integrasi ke pasar energi Nordik dan Eropa. Selain itu, negara Baltik bersama Eropa juga membuat kerangka pendukung lainnya, seperti *Baltic Energy Market Interconnection Plan* (BEMIP) dan *Three*

*Seas Initiative* sebagai upaya untuk pengintegrasian dengan jaringan energi Eropa (Thomas 2021).

Negara-negara Baltik menyadari bahwa ketergantungan pada jaringan listrik dari Rusia memosisikan mereka pada ancaman dan rentan terhadap isu keamanan pasokan energi. Isu ketahanan energi menjadi misi utama mereka dalam mengurangi ketergantungan dengan memperkuat kapasitas produksi energi domestik, terutama melalui investasi besar-besaran di bidang energi terbarukan. Pengurangan ketergantungan energi terhadap BRELL bertujuan juga untuk mempermudah akses sumber energi yang variatif, transisi ke energi terbarukan dan menghindari risiko gangguan pasokan akibat ketegangan politik (Bompard dkk. 2018). Langkah tersebut selaras juga dengan penetapan target oleh Uni Eropa mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan proporsi energi terbarukan dalam *hybrid energy* (Dewi 2013). Upaya itu juga akan memberikan keuntungan kepada negara Baltik untuk mengintegrasikan dirinya pada kebijakan energi Uni Eropa sekaligus memanfaatkan dukungan dan investasi yang tersedia pada pengembangan energi terbarukan.

Upaya dalam mengurangi ketergantungan energi dari Rusia menjadi langkah strategis bagi ambisi diversifikasi energi. Negara-negara Baltik melakukannya dengan pengembangan sistem energi di bawah *Projects of Common Interest* (PCI) Uni Eropa, termasuk pengembangan jaringan pipa non-Rusia dan impor LNG dari negara-negara anggota Uni Eropa dan mitra-mitra lainnya (Carnelian 2017). Namun, ambisi tersebut tidak serta merta berjalan dengan baik sebab negara-negara Baltik menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketergantungan pada pemasok tunggal, integrasi terbatas dengan jaringan energi

Eropa, kurangnya akses ke teknologi energi terbaru, dan kendala keuangan yang menghambat investasi dalam infrastruktur energi yang diperlukan. Pada konteks keuntungan yang didapatkan, negara-negara Baltik memperoleh beragam manfaat, seperti diversifikasi pasokan energi yang lebih beragam dan membuka akses pasar energi yang lebih luas sehingga mereka turut serta dalam program-program keberlanjutan energi Uni Eropa (Juanda dan Rosdiana 2022).

Dalam proses transisi energi, negara Baltik membutuhkan investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Namun, mereka sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan investasi pembiayaan dikarenakan ketidakpastian ekonomi dan politik. Selain itu, terdapat ketidakmerataan sumber daya energi terbarukan yang semakin menyulitkan proses transisi energi (Johnsen 2021). Contohnya Estonia yang memiliki potensi energi angin yang besar, tetapi infrastruktur untuk memanfaatkannya masih terbatas (Wind 2024). Namun, tantangan tersebut juga memiliki peluang yang bisa didapatkan, seperti penciptaan lapangan pekerjaan baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau (Bakhtiar dkk. 2024). Selain itu, transisi energi juga akan dapat mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat posisi negara-negara Baltik di pasar global.

Meskipun berbagai upaya diversifikasi telah dilakukan, invasi skala besar Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 secara langsung mengubah strategi dan kalkulasi dari negara Baltik. Peristiwa tersebut mengubah persepsi kalkulasi risiko dari negara Baltik, ketergantungan energi yang sebelumnya dianggap risiko politik jangka panjang yang dapat dikelola, kini berubah menjadi ancaman keamanan nasional yang mendesak dan bersifat nyata adanya. Invasi tersebut membuktikan

ketersediaan Rusia untuk menggunakan segala instrumen kekuatan, menjadikan status quo ketergantungan energi negara Baltik tidak dapat lagi dipertahankan. Hal tersebut mengubah isu sinkronisasi dari sebuah ambisi proyek jangka panjang menjadi sebuah keharusan keamanan nasional (Krūkle 2024).

Dengan demikian, meskipun merupakan tiga negara berdaulat, posisi Estonia, Latvia, dan Lithuania dalam isu ini dapat dianalisis sebagai satu subjek penelitian kolektif karena didasarkan pada konteks yang sama. Justifikasi tersebut berdiri atas warisan struktural identik dari era Soviet. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga negara Baltik mewarisi infrastruktur energi yang secara bersamaan dirancang untuk menciptakan ketergantungan pada Rusia. Kemudian diperkuat oleh persepsi ancaman seragam pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 yang mengubah isu ini menjadi tantangan keamanan eksistensi bersama. Terlebih lagi, solusi yang ditempuh, yaitu desinkronisasi dari sistem BRELL dan sinkronisasi dengan jaringan Uni Eropa. Secara teknis hal tersebut menuntut aksi terkoordinasi sebagai satu blok yang utuh, bukan sebagai tiga entitas terpisah (European Commission, t.t.).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi sinkronisasi energi negara Baltik dalam mengurangi ketergantungan terhadap Rusia tahun 2022 hingga 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui strategi negara Baltik dalam desinkronisasi dan pengurangan ketergantungan energi dengan Rusia.

2. Mengetahui strategi negara Baltik dalam sinkronisasi dan integrasi energi dengan Uni Eropa.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup strategi dan upaya dari negara-negara Baltik untuk bisa mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Penulis akan menganalisis kondisi ketergantungan struktural dan keharusan aksi kolektif yang mengikat ketiga negara Baltik. Secara historis, ketiga negara mewarisi infrastruktur energi yang sama dari era Soviet, terutama sistem kelistrikan BRELL, yang menciptakan sebuah kerentanan regional yang seragam dan saling terkait. Lebih lanjut, solusi untuk mengatasi kerentanan ini, yaitu sinkronisasi dengan jaringan Eropa, secara teknis tidak mungkin dilakukan secara individual melainkan menuntut mereka untuk bertindak sebagai satu blok tunggal. Keterikatan strategis tersebut terbukti melalui adanya kesepakatan politik tingkat tinggi seperti Deklarasi Bersama Perdana Menteri pada tahun 2023 dan implementasi proyek-proyek infrastruktur lintas batas yang terkoordinasi. Penelitian ini berfokus kepada jaringan energi listrik, gas, dan energi terbarukan. Pemilihan rentang tahun 2022-2024 didasari sebab periode tersebut merupakan fase krusial bagi negara-negara Baltik dalam melaksanakan kebijakan transisi energi. Periode tersebut dipilih karena invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi katalisator yang mengakselerasi kebijakan transisi energi negara-negara Baltik secara drastis dan para operator sistem transmisi dari ketiga negara Baltik mulai mendapatkan hibah untuk memulai proyek. Pada tahun 2023, Perdana Menteri negara-negara Baltik sepakat untuk mempercepat proses sinkronisasi. Tahun 2024 dipilih karena

merupakan awal target dari negara-negara Baltik untuk menyelesaikan sinkronisasi dengan jaringan Eropa.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu keamanan energi di kawasan Baltik, namun dengan fokus dan juga analisis yang berbeda. Analisis terhadap studi-studi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang coba diisi oleh skripsi ini dan melalui fokus dan pendekatan yang berbeda pula.

Studi oleh Songying Fang, dkk. (2024) yang menganalisis pengaruh geopolitik dalam proses sinkronisasi jaringan listrik Baltik menggunakan *Game Theory*. Argumen utama dalam studi tersebut adalah Rusia cenderung tidak kooperatif dan berpotensi melakukan ancaman untuk memutus hubungan listrik sebelum proses sinkronisasi selesai. Namun, penelitian tersebut berfokus pada dinamika geopolitik antar aktor Rusia, aliansi Transatlantik (UE,US), dan negara-negara Baltik. Sayangnya, studi tersebut tidak melihat banyak peran aktor non-negara yang sangat berperan krusial juga untuk proyek sinkronisasi sehingga akan terdapat evaluasi untuk studi ini, yaitu penelitian ini akan melengkapi analisis geopolitik tersebut dengan membedah dari berbagai macam aktor yang terlibat dan bagaimana negara kecil dapat mengelola agenda dan memindahkan ranah militer ke ranah institusional (Fang dkk. 2024).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Anatolijs Mahnitko, dkk. (2020) yang membahas mengenai tantangan teknis dalam proses integrasi sistem energi Baltik ke jaringan Eropa. Dalam penelitian tersebut terdapat argumen utama, yaitu integrasi negara Baltik merupakan cara efektif untuk meningkatkan kemandirian

energi. Akan tetapi, fokusnya lebih pada gambaran umum proses teknis dan kurang mendalam pada aspek strategis dan politis di balik pengambilan keputusan. Menciptakan sebuah evaluasi, yakni penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menerapkan kerangka *Complex Interdependence* untuk menganalisis bagaimana strategi tersebut dieksekusi dan melampaui standar teknis (Mahnitko dkk. 2020).

Lalu studi oleh Chikkitta Carnelian, dkk. (2017) yang membahas bagaimana Rusia menggunakan dominasi gas alam untuk mempertahankan pengaruhnya di Baltik. Studi tersebut sangat relevan dalam mengidentifikasi masalah awal, namun cakupannya terbatas pada strategi Rusia di sektor gas dan tidak membahas respons strategis dari negara Baltik, terutama pada sektor listrik dan upaya sinkronisasi pasca-2022. Terdapat evaluasi atas penelitian tersebut dimana penelitian ini akan mengambil langkah lebih lanjut dengan menganalisis respons negara Baltik, bukan hanya sebagai objek kebijakan energi Rusia, tetapi sebagai subjek yang memiliki strategi untuk mengubah struktur ketergantungan mereka (Carnelian dkk. 2017).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek geopolitik, tantangan teknis, atau strategi Rusia. Belum ada studi yang secara spesifik dan mendalam menganalisis mekanisme strategis yang digunakan oleh negara-negara Baltik itu sendiri dengan menggunakan kerangka interdependensi kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengadopsi *Complex Interdependence Theory* dalam kerangka yang dikembangkan oleh Robert Owen Keohane dan Joseph Nye dalam karya mereka, yaitu "*Power and Interdependence*" edisi keempat tahun 2012. Buku edisi keempat dengan memperluas pandangan mengenai proses ketergantungan kompleks dapat mempengaruhi hubungan internasional pada era globalisasi yang lebih maju. Edisi keempat tersebut juga menyempurnakan konsep ketergantungan kompleks yang mencakup tantangan dan dinamika baru yang ada di abad ke-21, seperti globalisasi digital, ancaman transnasional, serta perubahan aktor utama pada panggung internasional (Keohane dan Nye 2012).

Teori *Complex Interdependence* menekankan bahwa dalam dunia yang saling terhubung, dinamika hubungan antarnegara tidak hanya melibatkan kekuasaan militer tetapi turut dipengaruhi oleh interaksi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kompleks. Teori tersebut menekankan pentingnya kerja sama dan negosiasi lintas sektor dalam mengelola tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas batas dan lintas sektor menjadi kunci untuk mengelola dinamika global yang terus berkembang (Keohane dan Nye 2012, 19-21). Teori tersebut dikembangkan bukan untuk menolak paradigma realis, melainkan untuk membangun sebuah kerangka kerja yang mampu memadukan wawasan dari tradisi realis dan liberal, sehingga lebih akurat dalam menganalisis politik dunia yang semakin kompleks (Keohane dan Nye 2012, 4).

Wawasan kunci dari teori tersebut bahwa dalam kondisi interdependensi, kekuasaan tidak hanya bersumber dari kapabilitas militer, tetapi juga dari asimetri

dalam ketergantungan. Untuk menganalisis asimetri ini, Keohane dan Nye mengajukan dua konsep sentral: Pertama, kepekaan (*sensitivity*) untuk mengukur seberapa cepat perubahan di satu negara merugikan negara lain dan seberapa besar kerugian tersebut apabila diasumsikan kerangka kebijakan yang ada belum berubah (Keohane dan Nye 2012, 9-11). Kedua, adalah kerentanan (*vulnerability*) yang menekankan kewajiban suatu aktor untuk menanggung biaya yang dikenakan oleh peristiwa eksternal bahkan setelah kebijakan diubah. Kerentanan ditentukan oleh ketersediaan dan mahalnya biaya alternatif yang dihadapi sebuah negara. Oleh karena itu, kerentanan asimetris menjadi sumber kekuasaan paling kuat dalam sebuah hubungan interdependensi (Keohane dan Nye 2012, 9-11).

**Tabel 1. Karakter Teori *Complex Interdependence***

	<i>Characters</i>	<i>Definition</i>
<b><i>Complex Interdependence</i></b>	<i>Multiple Channels</i>	<i>Multiple channels connect societies, including: informal ties between governmental elites and transnational organizations (such as multinational banks).</i>
	<i>Absence of Hierarchy Among Issues</i>	<i>The agenda of interstate relationships consists of multiple issues that are not arranged in a clear or consistent hierarchy.</i>
	<i>Minor Role of Military Force</i>	<i>Military force could be irrelevant to resolving disagreements on economic issues among members of an alliance.</i>

Sumber: Keohane dan Nye (2012).

Selain itu, terdapat beberapa indikator kunci yang digunakan dalam merumuskan *Complex Interdependence Theory*, yaitu:

### 1. *Multiple Channels*

*Multiple Channels*, menggambarkan pola komunikasi yang beragam di antara masyarakat dalam hubungan internasional (Keohane dan Nye 2012, 20). Hal tersebut mencakup hubungan *Interstate* melalui perjanjian formal atau kerja sama yang terstruktur, hubungan antara *Transgovernmental* yang memungkinkan interaksi di dalam negara tanpa melibatkan negara sebagai unit tunggal, dan hubungan *transnasional* yang melibatkan aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional atau organisasi internasional (Keohane dan Nye 2012, 20).

### 2. *Absence of Hierarchy Among Issue*

*Absence of Hierarchy Among Issues*, menunjukkan ketiadaan hierarki yang tetap di antara isu-isu internasional sebab keamanan militer tidak lagi secara konsisten mendominasi antaragenda atau isu dan menempatkan isu non-militer, seperti ekonomi, energi, sumber daya, serta lingkungan menjadi sama pentingnya (Keohane dan Nye 2012, 22).

### 3. *Minor Role of Military Force*

*Minor Role of Military Force*, yang memposisikan ketergantungan kompleks tidak dapat diselesaikan melalui ancaman atau penggunaan kekuatan militer (Keohane dan Nye 2012, 21). Sebaliknya, isu-isu ini membutuhkan solusi diplomatis, teknis, dan multilateral karena dampaknya bersifat lintas batas dan menyentuh kepentingan banyak aktor (Keohane dan Nye 2012, 21).

Namun, untuk memahami mekanisme strategis yang dijalankan, analisis tidak akan berhenti pada deskripsi kondisi struktural saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Keohane dan Nye, kondisi-kondisi karakteristik interdependensi kompleks inilah yang memungkinkan dan mendorong terjadinya *political processes* tertentu sebagai

instrumen utama kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan secara eksplisit mengidentifikasi bagaimana negara-negara Baltik, dalam ranah yang didefinisikan oleh ketiga karakteristik tersebut, secara aktif menggunakan *political processes* seperti *agenda setting*, *issue linkage*, *goals of actors*, *instruments of state policy*, dan *Roles of International Organizations* untuk mencapai tujuan diversifikasi energi mereka (Keohane dan Nye 2012, 24-31).

Dengan demikian, alur analisis skripsi ini bergerak secara sistematis. Pertama, mendefinisikan masalah melalui konsep *vulnerability* dan *sensitivity* (Bab 2). Kedua, menganalisis lingkungan strategis melalui tiga karakteristik *Complex Interdependence* (Bab 3) dan ketiga, menganalisis tindakan strategis yang diambil di dalam karakteristik tersebut melalui identifikasi *Political Processes* yang relevan (juga di dalam Bab 3).

*Complex Interdependence* ini bisa digunakan untuk menganalisis dengan subjek penelitian yang aktornya lebih dari satu karena fokusnya pada sistem dan jaringan interaksi, bukan negara tunggal. Dengan memanfaatkan ketiga karakteristiknya seperti, *Multiple Channels* dan Organisasi Internasional saja sudah bisa menjabarkan berbagai macam aktor bukan hanya aktor tunggal saja karena membutuhkan banyak interaksi untuk *Complex Interdependence* bisa digunakan (Keohane dan Nye 2012, 21-22).

## **1.7 Argumen Sementara**

Proses sinkronisasi energi negara Baltik dengan Eropa merupakan strategi sekaligus respons atas kondisi kerentanan (*vulnerability*) dan kepekaan (*sensitivity*) yang ekstrem terhadap Rusia. Kerentanan tersebut diawali atas ketergantungan

energi dan instabilitas ekonomi atas tekanan dari Rusia. Langkah integrasi dengan Eropa menjadi pilihan yang rasional sebab akan mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh negara Baltik. Melalui kepekaan, negara Baltik menyadari bahwa ada guncangan eksternal dalam kerangka kebijakan yang ada, seperti ketidakstabilan teknis instan yang berasal dari kendali frekuensi jaringan BRELL oleh Rusia.

Untuk menjawab kondisi kerentanan upaya akselerasi integrasi dengan Eropa menjadi pilihan strategis, karena upaya untuk mengurangi kerentanan tersebut dimungkinkan dan dibentuk oleh struktur interdependensi kompleks dengan Eropa, yang akan dianalisis melalui tiga karakteristik utama. Pertama, *Multiple Channels*, di mana negara-negara Baltik secara strategis memanfaatkan jaringan aktor Eropa (Uni Eropa, ENTSO-E, TSO) untuk mengatasi kerentanan finansial dan teknis mereka. Kedua, *Absence of Hierarchy Among Issues*, di mana isu keamanan energi, stabilitas ekonomi, proyek teknis, dan tujuan lingkungan dikelola secara seimbang untuk mencegah timbulnya kerentanan baru. Ketiga, *Minor Role of Military Force*, di mana jalur non-militer melalui diplomasi dan kolaborasi teknis dipilih karena merupakan cara paling efektif untuk membongkar struktur kerentanan energi tanpa menimbulkan eskalasi yang merugikan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara menciptakan suatu gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan

pandangan-pandangan terperinci yang diperoleh dari narasumber, dan dilakukan pada suatu latar yang alamiah (Walidin dkk. 2015).

#### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah negara-negara Baltik, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania yang berperan penting dalam upaya untuk mempercepat desinkronisasi dari jaringan energi Rusia sekaligus melakukan sinkronisasi dengan jaringan energi Uni Eropa. Objek dari penelitian ini adalah strategi yang diterapkan oleh negara-negara Baltik dalam mengakselerasi proses transisi ini antara tahun 2022 hingga 2024.

#### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data akan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan sebuah gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada topik tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi baik dari buku, artikel, laporan, dan laman.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Penelitian ini bermula dari menentukan teori yang relevan dengan topik yang dibahas dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Dilanjutkan dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian menganalisis data (mengaitkan teori dengan topik yang dibahas).

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini akan memuat empat bab secara sistematis untuk memudahkan keseluruhan uraian dan pembahasan dalam proposal ini yang mencakup di antaranya:

**BAB 1:** Berisi tentang penjelasan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB 2:** Menjelaskan interdependensi asimetris negara-negara Baltik pada Rusia, mulai dari awal mula ketergantungan, ketergantungan pasca kemerdekaan, infrastruktur energi yang terhubung dengan Rusia. Melalui konsep yang disebutkan oleh Keohane dan Nye, yaitu *Vulnerability* dan *Sensitivity*.

**BAB 3:** Menganalisis hasil penelitian berdasarkan landasan teori *Complex Interdependence* menurut Keohane dan Nye yang diselaraskan dengan strategi sinkronisasi energi dari negara-negara Baltik dengan menggunakan 3 indikator dari teori yaitu *Multiple Channels*, *Absence of Hierarchy Among Issues*, *Minor Role of Military Force*.

**BAB 4:** Bab terakhir berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan. Sehingga, bagian ini secara ringkas menyajikan seluruh temuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis penelitian.

## **BAB 2**

### **INTERDEPENDENSI ASIMETRIS NEGARA-NEGARA BALTIK TERHADAP RUSIA**

Negara-negara Baltik secara historis mewarisi struktur ketergantungan energi yang mendalam terhadap Rusia. Bab ini bertujuan untuk membongkar sifat dari ketergantungan tersebut dengan membuktikan bahwa hubungan ini bukan sekadar keterkaitan ekonomi, melainkan sebuah kondisi interdependensi asimetris yang menciptakan kerentanan strategis.

Untuk membedah kondisi tersebut, analisis akan dipandu oleh dua konsep sentral dari kerangka pemikiran Keohane dan Nye, yaitu Kepekaan (*sensitivity*) dan Kerentanan (*vulnerability*). *Sensitivity* akan digunakan untuk menganalisis dampak langsung yang dirasakan negara-negara Baltik akibat guncangan eksternal dalam kerangka kebijakan yang ada, seperti ketidakstabilan teknis yang berasal dari kendali frekuensi jaringan BRELL oleh Rusia. Sementara itu, *vulnerability* yang secara politik lebih fundamental akan digunakan untuk menganalisis jebakan struktural yang membuat mereka sulit mencari alternatif kebijakan yang efektif tanpa menanggung biaya yang sangat besar, sebagaimana terbukti dalam insiden pemerasan energi di masa lalu (Keohane dan Nye 2012, 10-11).

Dalam memahami secara keseluruhan mengenai bagaimana negara-negara Baltik merumuskan strategi sinkronisasi (yang akan dibahas pada Bab 3), penting untuk membedah terlebih dahulu akar masalahnya, seperti sifat interdependensi asimetris dengan Rusia. Bab ini akan membuktikan bahwa dalam hubungan energi bukanlah keterkaitan ekonomi biasa, melainkan sebuah kondisi kerentanan

strategis. Kondisi tersebut bukanlah kebijakan yang sengaja dibuat negara Baltik, melainkan sebuah warisan struktural dari era Soviet yang terpaksa mereka hadapi.

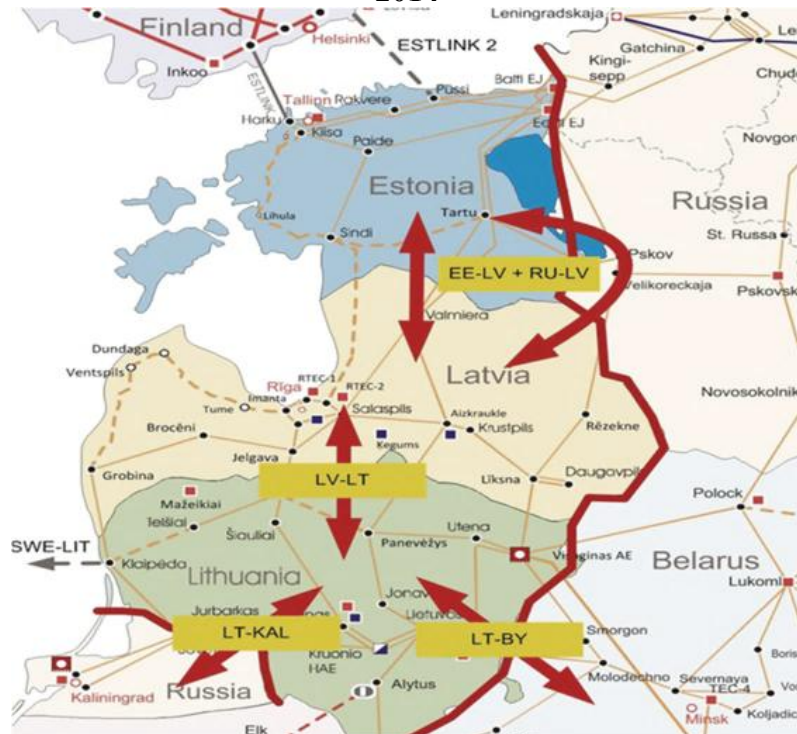
## **2.1 Warisan Struktural: Sejarah dan Infrastruktur Energi Bersama Rusia**

### *2.1.1 Sejarah Ketergantungan*

Ketergantungan energi negara-negara Baltik pada Rusia merupakan warisan struktural yang sengaja dibangun selama era Uni Soviet. Dengan memposisikan wilayah Baltik sebagai *buffer zone* strategis, Moskow secara sistematis mengintegrasikan infrastruktur energi mereka ke dalam sebuah sistem terpusat yang dikendalikannya (Matthews 2020). Fondasi teknis dari ketergantungan tersebut diletakkan melalui pengembangan sistem energi terpadu Soviet pada tahun 1950-an, yang kemudian diformalkan menjadi sistem BRELL (Belarus, Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania) pada tahun 2001 melalui perjanjian multilateral (Jansons 2014). Sistem tersebut mengunci jaringan listrik Baltik ke dalam satu zona sinkron yang frekuensinya diatur dari pusat kendali di Rusia (Publica 2022). Di sektor gas, pembangunan jaringan pipa yang terpusat dan monopoli pasokan oleh entitas seperti Gazprom juga menciptakan ketergantungan yang serupa, tanpa adanya alternatif yang layak secara ekonomi (Thomas 2021).

Setelah meraih kemerdekaan pada awal 1990-an, negara-negara Baltik dihadapkan pada sebuah jebakan structural (O'Connor 2015). Secara politis mereka merdeka, namun secara infrastruktur energi mereka tetap terpenjara dalam warisan Soviet. Biaya untuk membangun infrastruktur alternatif seperti terminal LNG atau interkonektor baru sangatlah mahal, membuat pilihan untuk tetap bergantung pada pasokan Rusia yang lebih murah menjadi sebuah keniscayaan ekonomi, meskipun berisiko secara politik (Carnelian 2017).

**Gambar 1. Interkoneksi Sistem Tenaga Listrik di Wilayah Baltik Tahun 2014**



Sumber: Elektor Magazine (2014)

Kerentanan tersebut secara ironis justru diperdalam oleh salah satu syarat keanggotaan mereka di Uni Eropa, seperti penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Ignalina di Lithuania pada tahun 2009. Penutupan PLTN yang memasok sebagian besar listrik regional ini menghilangkan sumber energi domestik yang vital, sehingga semakin meningkatkan ketergantungan mereka pada listrik dari sistem BRELL dan memperkuat posisi tawar Moskow (Houlton 2009). Misalnya, Latvia yang tetap masih mengimpor 100% gas dari Rusia hingga 2014 karena kurangnya alternatif energi (Bergmane 2020). Meskipun beberapa langkah awal menuju integrasi dengan Eropa telah diambil, seperti pembangunan interkonektor Estlink seperti yang terlihat pada Gambar 1, hingga menjelang periode 2022, negara-negara Baltik secara fundamental masih merupakan pulau

energi yang terisolasi dari Eropa dan terikat pada sistem yang dikendalikan oleh Rusia (Jansons 2014).

Upaya-upaya awal untuk diversifikasi energi, seperti pembangunan terminal LNG di Lithuania pada tahun 2014 berhasil mengurangi ketergantungan di sektor gas (KN Energies, t.t.). Namun, langkah-langkah ini belum mampu mengatasi akar masalah, yaitu keterkuncian fisik mereka dalam jaringan listrik BRELL. Walaupun negara-negara Baltik secara politik telah berhenti membeli listrik dan gas dari Rusia pasca-invasi 2022, secara teknis mereka tetap menjadi pulau energi yang terhubung dan bergantung pada sistem yang frekuensinya dikendalikan oleh Rusia (Al Jazeera 2025). Kondisi tersebut adalah perwujudan dari *vulnerability*. Mereka tetap terekspos pada risiko ketidakstabilan teknis yang bisa dipicu oleh Rusia dan biaya untuk sepenuhnya melepaskan diri dari sistem ini tetap sangat tinggi, sehingga membatasi otonomi kebijakan energi mereka secara signifikan.

Menurut laporan *Free Policy Briefs*, setidaknya negara-negara Baltik masih mengimpor sekitar 10% listrik dari Rusia sebelum tahun 2022 (Carlson dan Le Coq 2022). Ketergantungan tersebut tidak lepas dari warisan struktur infrastruktur energi era Soviet yang masih mendominasi sistem energi negara-negara Baltik. Rangkaian peristiwa historis tersebut menunjukkan bagaimana ketergantungan energi negara-negara Baltik bukanlah sekadar faktor ekonomi, melainkan sebuah struktur yang sengaja dibangun selama era Soviet untuk tujuan kontrol politik. Struktur inilah yang menjadi sumber dari kondisi interdependensi asimetris yang akan kita bedah lebih dalam pada bagian selanjutnya dengan menganalisis secara

spesifik arsitektur fisik dari jaringan gas dan listrik yang menciptakan kondisi *sensitivity* dan *vulnerability* tersebut.

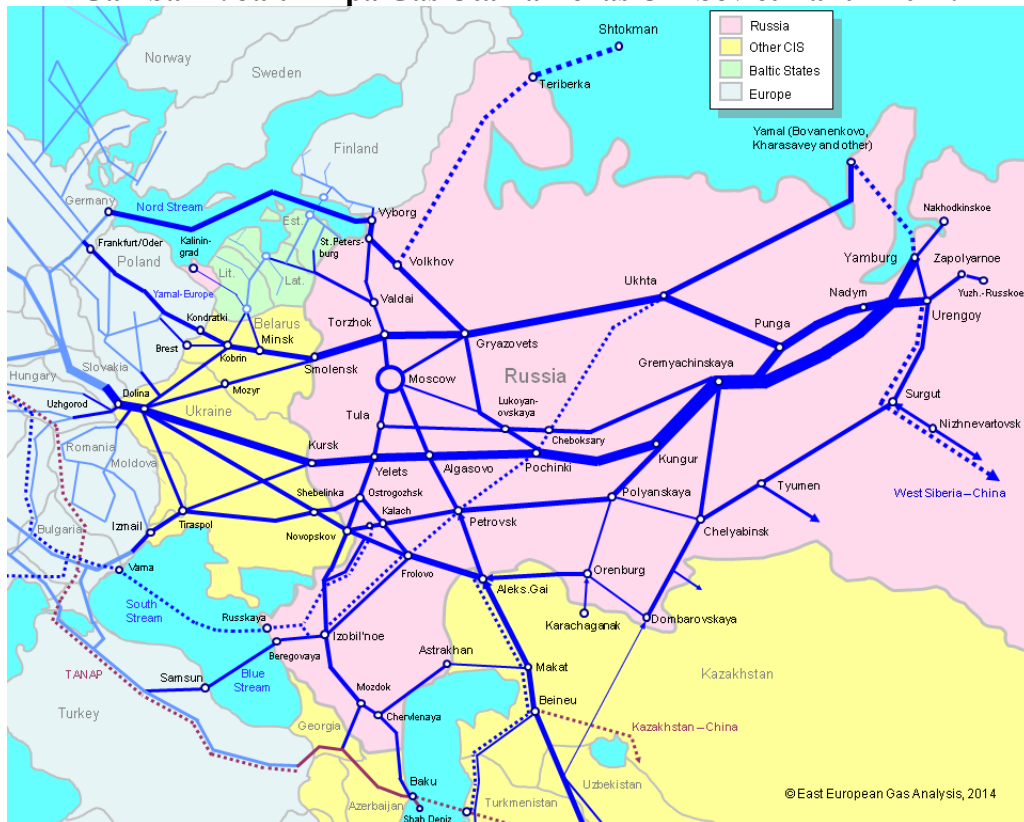
Kondisi interdependensi asimetris negara-negara Baltik secara fisik diwujudkan melalui arsitektur infrastruktur energi warisan Soviet. Bagian ini akan menganalisis bagaimana dua jaringan energi utama gas alam dan listrik yang tidak hanya berfungsi sebagai saluran pasokan, tetapi juga sebagai struktur kekuasaan yang secara sistematis menciptakan serta memperdalam kondisi *sensitivity* dan *vulnerability* bagi negara-negara Baltik.

### 2.1.2 Gas Alam

Dominasi perusahaan gas terkemuka di Rusia, yakni Gazprom, perusahaan yang melanjutkan kewenangan dalam bidang gas, di Rusia setelah runtuhnya rezim Soviet pada tahun 1989 (Defeuilley 2009). Gazprom menguasai saham mayoritas di perusahaan gas Baltik melalui akuisisi strategis. Gazprom sudah melaksanakan serangkaian akuisisi strategis terhadap utilitas gas alam, mengakuisisi saham energi di negara-negara Baltik seperti 40% dari perusahaan gas di Lithuania, 37% pada perusahaan energi di Estonia, yakni *Eesti Gaas*, dan 34% pada perusahaan energi Latvia, yaitu di *Latvijas Gaze* (Elletson 2006).

Akuisisi tersebut lebih juga untuk mengontrol pasar dari dalam. Dengan memiliki saham signifikan di perusahaan gas nasional Gazprom tidak hanya mengontrol pasokan di perbatasan, tetapi juga mempengaruhi distribusi dan kebijakan harga domestik. Hal tersebut secara drastis meningkatkan biaya bagi negara-negara Baltik untuk mencari alternatif yang merupakan inti dari definisi *vulnerability*.

**Gambar 2. Jalur Pipa Gas Utama Bekas Uni Soviet Tahun 2014.**



Sumber: *East European Gas Analysis* (2014)

Sebagaimana Gambar 2 di atas, Rusia memiliki infrastruktur gas yang menghubungkan antara Rusia dan negara Baltik. Rusia juga membutuhkan negara-negara Baltik untuk dapat memasok pasokan energi mereka ke kawasan Kaliningrad, infrastruktur yang sudah ada membuat ketergantungan dari negara-negara Baltik juga semakin besar. Lalu pipa gas *Nord Stream* yang menghubungkan Rusia dengan Jerman melalui laut Baltik (Eegas 2014).

Gazprom memiliki dominasi yang kuat di dalam pasokan energi ke negara-negara Baltik bahkan hingga Eropa dan menciptakan ketergantungan dengan strategi yang dimiliki perusahaan tersebut. Gazprom sudah memiliki kekuasaan besar atas ekonomi, monopoli virtual pada impor, transmisi, dan juga distribusi gas. Infrastruktur yang telah ditinggalkan Uni Soviet menjadi alasan lamanya ketergantungan negara-negara Baltik terhadap Rusia. Tanpa dukungan Eropa,

ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas karena bergantung kepada pemasok tunggal dan pasar energi yang terbatas pandangan tersebut mengkonfirmasi konsep *vulnerability* (Elletson 2006). Ruang gerak yang terbatas adalah tingginya biaya untuk mengubah kebijakan yang secara langsung memberikan Rusia daya tawar politik besar dalam hubungan interdependensi asimetris ini.

### 2.1.3 Listrik

Uni Soviet mengembangkan sistem energi terpadu pada tahun 1950-an yang menjadi salah satu area sinkronisasi sistem tenaga listrik terbesar di dunia pada masanya. UPS/IPS terdiri dari jaringan dan interkoneksi antara sistem tenaga terpadu Rusia atau *Unified Power System* (UPS) dan sistem tenaga listrik terpadu atau *Integrated Power System* (IPS) yang mencakup negara-negara, seperti Baltik, Belarus, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Kazakhstan, dan beberapa negara lainnya. Dengan cakupan wilayah yang luas dan kapasitas pembangkitan terpasang lebih dari 300GW, IPS/UPS. Hal tersebut membuat untuk menguatnya interkoneksi jaringan di wilayah tersebut, semakin memperkuat ketergantungan negara-negara Baltik pada sistem energi yang dikendalikan oleh Rusia (Jansons 2014).

Ketika negara-negara Baltik mendapatkan kembali kemerdekaannya pada tahun 1990, mereka juga mengambil alih infrastruktur kelistrikan yang ada di wilayah masing-masing. Namun, kekuasaan atas pengelolaan sistem tersebut masih berlanjut dari Rusia. Pada tahun 2001, untuk bisa mengatur sistem terpadu dalam manajemen dan pengoperasian dari jaringan energi, terdapat perjanjian bernama BRELL yang merupakan akronim dari nama negara-negara peserta, di antaranya yaitu Belarus, Rusia, Estonia, Lithuania, dan Latvia (Publica 2022).

**Gambar 3. Cincin Energi Sistem UPS/IPS BRELL**



Sumber: Litgrid t.t

Gambar 3 menggambarkan kelima negara BRELL menjadi sebuah cincin energi yang terhubung dengan negara-negara Baltik terhubung dengan sistem energi dari Rusia dan Belarus. Perjanjian BRELL adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh operator sistem transmisi dari kelima negara BRELL yang menetapkan standar teknis dan aturan operasi untuk menjaga kualitas daya serta memastikan pasokan listrik yang stabil dan andal (Publica 2022). Perjanjian BRELL tersebut secara formal mengunci negara-negara Baltik ke dalam sebuah arsitektur teknis yang secara inheren menciptakan *sensitivity* yang tinggi. Dengan kendali frekuensi yang terpusat di Rusia, stabilitas jaringan listrik mereka setiap saat bergantung pada keputusan operasional yang dibuat di luar perbatasan mereka.

Rusia memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap perjanjian ini, terutama karena BRELL dapat memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat di wilayah Kaliningrad yang tergantung pada pasokan listrik dari Lithuania. Selama ini, sistem energi Kaliningrad mengalami kekurangan investasi dan tidak mampu memenuhi

tuntutan yang semakin tinggi, termasuk untuk keperluan militer. Dalam konteks ini, kontrak BRELL menjadi solusi penting untuk masalah energi yang dihadapi. Namun, dengan rencana Lithuania untuk keluar dari sistem, Kaliningrad kini telah melakukan diversifikasi dengan membangun pembangkit listrik berbahan bakar gas tambahan, fasilitas penyimpanan gas bawah tanah, dan terminal LNG, sehingga mampu beroperasi secara mandiri (Publica 2022).

Fakta bahwa Rusia sudah berinvestasi besar untuk membangun pembangkit listrik dan terminal LNG di Kaliningrad sebagai respons atas rencana keluarnya Lithuania dari sistem, justru memperkuat argumen tentang kekuatan *vulnerability*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rusia sendiri mengakui betapa berisikonya menjadi pihak yang lebih rentan dalam sebuah hubungan interdependensi. Tindakan Rusia ini adalah cerminan dari strategi yang sama yang sedang dijalankan oleh negara-negara Baltik, yaitu mengurangi kerentanan dengan cara membangun alternatif, meskipun dengan biaya tinggi.

Dengan demikian, baik melalui monopoli pipa gas Gazprom maupun struktur kendali terpusat Cincin Energi BRELL, arsitektur fisik warisan Soviet adalah perwujudan sempurna dari dua dimensi kekuasaan interdependensi. Kendali frekuensi jaringan energi tersebut menciptakan kepekaan yang tinggi bagi negara Baltik, setiap saat Rusia dapat menciptakan ketidakstabilan teknis yang dampaknya dirasakan secara instan. Disisi lain, fakta bahwa mereka secara fisik terkunci dalam sistem ini tanpa adanya interkoneksi alternatif yang sepadan dengan Eropa merupakan sumber kerentanan yang fundamental. Sesuai dengan definisi Keohane dan Nye, mereka tidak memiliki alternatif yang murah dan cepat untuk mengubah

kondisi tersebut, yang secara langsung memberikan Rusia daya tawar politik yang besar (Keohane dan Nye 2012).

## **2.2 Politisasi Energi Pada Kerentanan sebagai Senjata Geopolitik**

Struktur ketergantungan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga secara aktif dimanfaatkan oleh Rusia sebagai instrumen tekanan politik. Sejarah hubungan energi Baltik dan Rusia diwarnai oleh insiden-insiden sebab Rusia secara eksplisit mengeksploitasi kerentanan negara-negara Baltik untuk mencapai tujuan geopolitik. Insiden-insiden tersebut adalah bukti dari kondisi interdependensi asimetris yang menempatkan negara-negara Baltik pada posisi yang berbahaya.

Salah satu contoh paling awal dan paling jelas terjadi pada tahun 1990, ketika Rusia memberlakukan blokade ekonomi dan energi terhadap Lithuania sebagai respons terhadap deklarasi kemerdekaannya. Insiden tersebut adalah contoh dari eksploitasi kerentanan. Dengan memutus pasokan, Rusia menunjukkan bahwa Lithuania tidak memiliki alternatif yang terjangkau dan cepat untuk memenuhi kebutuhan energinya. Tindakan tersebut secara langsung membuktikan bahwa ketergantungan energi mereka adalah sebuah kelemahan strategis yang dapat digunakan untuk mengintervensi kedaulatan negara (Froehly 2025).

Pola yang sama terulang dalam konteks yang lebih modern sebab pada tahun 2006, Rusia menghentikan pasokan minyak ke Lithuania setelah negara tersebut menjual kilang minyaknya kepada perusahaan Polandia, PKN Orlen, bukan kepada perusahaan Rusia (Brown 2019). Langkah tersebut kembali mengekspos kerentanan Lithuania karena ketiadaan pasokan alternatif, sekaligus

menegaskan bahwa setiap keputusan kebijakan luar negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan Rusia dapat dihukum melalui instrumen energi (Brown 2019). Melalui serangkaian insiden ini, terlihat jelas bahwa ketergantungan energi tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga alat strategis yang secara konsisten dipolitisasi oleh Rusia untuk mempengaruhi stabilitas regional dan kedaulatan nasional negara-negara Baltik.

Insiden-insiden pada tahun 1990 dan 2006 diatas secara langsung memperlihatkan biaya kerentanan yang harus ditanggung negara-negara Baltik. Biayanya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga hilangnya otonomi kebijakan dan kedaulatan nasional yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan sepihak Rusia. Ini adalah harga yang mereka bayar karena terjebak dalam struktur ketergantungan tanpa memiliki alternatif yang layak.

Di era kontemporer, eksploitasi kerentanan ini berevolusi melampaui pemutusan pasokan fisik. Sebagaimana diperingatkan oleh Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas, Rusia secara aktif menggunakan serangan siber dan kampanye disinformasi untuk mendestabilisasi negara-negara Baltik. Laporan keamanan Lithuania mengonfirmasi bahwa Rusia menyebarkan narasi yang menimbulkan kepanikan, seperti klaim bahwa sinkronisasi dengan jaringan Eropa akan menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran (Tatarélytė 2025). Dengan menargetkan kepercayaan publik terhadap proses transisi energi, Rusia berupaya untuk melumpuhkan kemauan politik negara-negara Baltik dari dalam. Ancaman-ancaman tersebut menunjukkan bahwa *vulnerability* tidak hanya bersifat fisik, seperti ketergantungan pasokan tetapi juga bersifat siber dan sosial yang mengancam stabilitas nasional.

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi katalisator yang menegaskan bahwa ketergantungan energi pada Rusia adalah sebuah kerentanan (Krūkle 2024). Untuk memahami bahwa akselerasi integrasi energi menjadi salah satunya pilihan yang rasional, kondisi interdependensi asimetri mereka dengan Rusia perlu dibedah menggunakan dua konsep sentral dari kerangka Keohane dan Nye, yaitu *Sensitivity* dan *Vulnerability*.

Pertama, *sensitivity* (kepekaan) itu sendiri menurut Keohane dan Nye mengukur “seberapa cepat perubahan di suatu negara membawa perubahan yang merugikan bagi negara lain, dan seberapa besar kerugian tersebut” dalam kerangka kebijakan yang ada dan belum berubah (Keohane dan Nye 2012, 10). Pada kurun waktu 2022-2024, negara-negara Baltik mengalami *sensitivity* yang ekstrem. Secara teknis, meskipun mereka telah menghentikan ekspor listrik dari Rusia, koneksi fisik mereka ke dalam sistem BRELL membuat mereka sangat peka terhadap setiap keputusan Rusia.

Secara ekonomi, tindakan Rusia memicu guncangan harga energi global, dan keterhubungan negara-negara Baltik dengan pasar energi Nordik membuat mereka sangat peka terhadap lonjakan harga tersebut. Bukti paling nyata dari "kerugian" ini adalah meroketnya tingkat inflasi tahunan pada 2022, yang mencapai 19.4% di Estonia, 18.9% di Lithuania, dan 17.2% di Latvia, sebuah contoh langsung dari tingginya *sensitivity* mereka (Ratings 2025). Lonjakan inflasi yang ekstrem tersebut adalah perwujudan nyata dari *cost of sensitivity*, yaitu dampak ekonomi langsung dan menyakitkan yang harus ditanggung oleh masyarakat Baltik akibat keterhubungan mereka dengan pasar energi yang dipengaruhi Rusia, sebelum mereka dapat sepenuhnya mengubah kebijakan dan infrastruktur mereka.

Kedua, *vulnerability* (kerentanan) adalah dimensi selanjutnya yang lebih dalam, yang didefinisikan sebagai “kewajiban aktor untuk menderita kerugian bahkan setelah kebijakan diubah yang diukur dari mahalnya biaya alternatif” (Keohane dan Nye 2012, 10). Pada tahun 2022 secara tidak langsung mengekspos betapa beratnya *vulnerability* negara-negara Baltik. Sesuai definisi Keohane dan Nye, *vulnerability* diukur dari tingginya biaya penyesuaian yang harus ditanggung suatu negara untuk mengubah kebijakannya. Meskipun secara politis negara-negara Baltik memutuskan untuk lepas dari Rusia, mereka tidak bisa begitu saja memutuskan koneksi dari sistem BRELL. Hal tersebut menunjukkan betapa dalamnya kerentanan mereka. *cost of vulnerability* dalam hal tersebut terlihat sebagai biaya untuk mengubah kebijakan yang sangat mahal. Biaya proyek sinkronisasi yang mencapai miliaran Euro secara finansial, ditambah lagi dengan adanya risiko pemadaman listrik total secara teknis adalah harga yang harus mereka bayar untuk membangun alternatif dan melepaskan diri dari struktur ketergantungan yang diwariskan. (Bajarūnas 2025).

Berdasarkan analisis terhadap sejarah, arsitektur infrastruktur, dan politisasi energi yang telah diuraikan, terdapat ketergantungan historis pada Rusia dengan menempatkan negara-negara Baltik dalam kondisi interdependensi asimetris yang ekstrem. Negara Baltik mengalami *sensitivity* yang akut terhadap guncangan teknis dan ekonomi, tetapi juga terjebak dalam *vulnerability* yang mendalam akibat ketiadaan alternatif yang terjangkau dan eksploitasi energi sebagai senjata geopolitik oleh Rusia.

Setelah membuktikan adanya masalah yang mendesak ini, bab selanjutnya akan beralih ke analisis solusinya. Bab tersebut akan membedah secara sistematis

bagaimana negara-negara Baltik mengeksekusi strategi sinkronisasi dengan Eropa sebagai respons terhadap kondisi kerentanan ini dengan menggunakan tiga karakteristik dari kerangka teori *Complex Interdependence* sebagai alat analisisnya. Pada era kontemporer, eksploitasi kerentanan tersebut berevolusi melampaui pemutusan pasokan fisik. Serangkaian berbagai insiden tersebut mulai dari blokade fisik hingga perang informasi secara kolektif membuktikan bahwa interdependensi asimetris dengan Rusia telah menciptakan kondisi kerentanan strategis yang akut dan tidak dapat dipertahankan. Ketergantungan ini secara konsisten dipolitisasi dan dimanfaatkan sebagai senjata, membuat setiap upaya untuk mempertahankan status quo menjadi sangat berisiko bagi kedaulatan dan stabilitas nasional negara-negara Baltik.

### BAB 3

## SINKRONISASI ENERGI NEGARA-NEGARA BALTIK DENGAN JARINGAN EROPA: ANALISIS STRATEGIS MELALUI PENDEKATAN *COMPLEX INTERDEPENDENCE*

Bab ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana mereka mengeksekusi strategi untuk keluar dari jebakan kerentanan yang disebabkan oleh Rusia. Strategi tersebut, yaitu akselerasi sinkronisasi dengan jaringan energi Eropa yang akan dibedah dengan menggunakan tiga karakteristik dari kerangka teori *Complex Interdependence*. Upaya sinkronisasi bukanlah sekadar keputusan teknis, melainkan sebuah proses politik yang menunjukkan proses negara-negara Baltik secara strategis mengelola interdependensi untuk membongkar struktur kerentanan mereka. Analisis dalam bab ini akan diorganisir ke dalam tiga bagian utama yang masing-masing menguji satu karakteristik teori.

Pertama, *Multiple Channels*, yang menyatakan interaksi terjadi melalui beberapa jalur, termasuk di dalamnya *interstate* (antar pemerintah), *transgovernmental* (antar birokrasi teknis), dan *transnational* (melibatkan aktor non-negara seperti korporasi dan organisasi internasional) (Keohane dan Nye 2012, 21). Kedua, *Absence of Hierarchy Among Issues*, yang berarti keamanan militer tidak lagi secara konsisten mendominasi antar agenda atau isu, dan isu-isu non-militer seperti ekonomi, energi, sumber daya, dan lingkungan menjadi sama pentingnya (Keohane dan Nye 2012, 22). Ketiga, *Minor Role of Military Force*, yaitu kekuatan militer menjadi instrumen yang tidak efektif dan terlalu mahal untuk menyelesaikan perselisihan seperti kesejahteraan ekonomi atau ekologi. (Keohane dan Nye 2012, 23). Setelah menganalisis bagaimana karakteristik dapat

menganalisis strategi sinkronisasi, setelah itu karakteristik bisa untuk melihat *political processes* yang ada dan yang dijalankan oleh negara Baltik dalam strategi sinkronisasinya

### **3.1 Multiple Channels**

Dalam kerangka teori *Complex Interdependence*, karakteristik *Multiple Channels* merujuk pada interaksi keseluruhan jaringan formal dan informal (Keohane dan Nye 2012, 20-24). Saluran formal mencakup hubungan *interstate* yang tradisional, seperti pertemuan tingkat tinggi antar perdana menteri atau perjanjian resmi. Adapun *interstate* juga mencakup organisasi internasional formal, seperti keanggotaan sebuah negara dalam PBB, Uni Eropa, NATO, dan termasuk pada kerangka kerja formal. Sebaliknya, saluran informal adalah interaksi yang terjadi langsung antar aktor tanpa harus melalui jalur diplomatik resmi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Keohane dan Nye, *informal ties between governmental elites* (jalur *transgovernmental*) dan *informal ties among non-governmental elites* (jalur *transnational*) (Keohane dan Nye 2012, 20). Pemahaman atas perbedaan interaksi jaringan menjadi krusial untuk menganalisis alasan atas pilihan strategis negara yang dibentuk oleh interaksi dari berbagai level aktor, baik yang formal maupun informal.

Strategi sinkronisasi negara-negara Baltik berhasil dieksekusi bukan karena kekuatan internal mereka sendiri, melainkan karena kemampuan mereka untuk memanfaatkan karakteristik *Multiple Channels* yang ditawarkan oleh jaringan aktor Eropa. Menghadapi defisit kapabilitas finansial dan teknis yang signifikan, negara-negara Baltik tidak dapat menjalankan proyek sinkronisasi yang masif ini sendirian.

Oleh karena itu, akan dijelaskan dengan tiga jenis saluran yang berbeda untuk memobilisasi sumber daya yang krusial, yang akan dibedah dalam tiga bagian berikut:

1. Saluran *Interstate*: Menganalisis bagaimana jalur hubungan formal antar pemerintah digunakan untuk mengamankan legitimasi politik dan pendanaan masif dari institusi internasional seperti Uni Eropa.
2. Saluran *Transgovernmental*: Menganalisis bagaimana jalur hubungan langsung antar birokrasi teknis memungkinkan para teknokrat dan operator sistem untuk berkoordinasi secara efektif guna mengatasi tantangan teknis yang kompleks.
3. Saluran *Transnational*: Menganalisis bagaimana jalur yang melibatkan aktor non-negara berhasil memobilisasi investasi, teknologi, dan keahlian dari sektor swasta seperti perusahaan energi dan lembaga keuangan.

### 3.1.1 Saluran *Interstate*

Untuk menjawab upaya negara-negara Baltik yang secara individual kecil, dapat memobilisasi kekuatan politik dan finansial yang masif dengan dimulai dari saluran *interstate*. Jalur tersebut yang mencakup hubungan formal antar pemerintah dan interaksi di dalam institusi internasional seperti Uni Eropa, menjadi mekanisme krusial bagi negara Baltik untuk mengatasi kerentanan regional mereka.

Negara-negara Baltik menggunakan saluran *interstate* untuk mengubah posisi tawar mereka dari tiga negara kecil yang terpisah menjadi sebuah blok regional yang solid. Mekanisme utamanya adalah melalui kesepakatan tingkat tinggi yang mengirimkan sinyal komitmen yang tak terbantahkan. Contoh paling jelas adalah kesepakatan para perdana menteri pada Agustus 2023 untuk mempercepat sinkronisasi ke Februari 2025 (Prime Ministers of the Baltic States

2023). Dalam dokumen tersebut, para pemimpin secara eksplisit membingkai ulang isu sinkronisasi dari masalah teknis menjadi sebuah keharusan keamanan nasional dengan menyatakan:

*“The fact that the Baltic States still remain a part of the IPS/UPS electricity system, managed from Russia, which is a threat to the Baltic States' energy security. The shifted geopolitical situation, resulting from the unprovoked invasion of Ukraine by the Russian Federation, has also significantly deteriorated the energy security situation in the region and increased the risks of unplanned de-synchronization. These circumstances clearly indicate the need to accelerate all necessary arrangements for earlier synchronization with Continental European Network (Prime Ministers of the Baltic States 2023).*

Sebelum secara efektif memanfaatkan jaringan Eropa, langkah krusial pertama bagi negara-negara Baltik adalah menyatukan posisi mereka melalui saluran *interstate* internal. Menyadari bahwa kerentanan individual mereka hanya dapat diatasi melalui aksi kolektif, para pemimpin Estonia, Latvia, dan Lithuania secara intensif menggunakan jalur diplomasi tingkat tinggi di antara mereka sendiri untuk menyatukan sikap dan strategi. Proses tersebut mengubah tiga negara kecil dengan masalah serupa menjadi satu blok regional dengan suara tunggal dalam isu keamanan energi. Kebersamaan internal tersebut bukan cuma asumsi semata, melainkan strategi yang dibangun secara rasional untuk memperkuat posisi tawar mereka sebelum berhadapan dengan aktor eksternal yang lebih besar seperti Rusia dan Komisi Eropa (Prime Ministers of the Baltic States 2023).

Kebersamaan *interstate* internal tersebut adalah kesepakatan para perdana menteri pada 3 Agustus 2023 untuk mempercepat sinkronisasi. Pernyataan bersama yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut menunjukkan bagaimana front persatuan politik yang solid tersebut digunakan secara formal. Dengan mendeklarasikan

bahwa keterhubungan dengan sistem yang dikelola Rusia adalah sebuah ancaman, para perdana menteri secara kolektif melakukan perubahan strategi terhadap isu energi tersebut (Prime Ministers of the Baltic States 2023). Tindakan diplomatik tingkat tinggi tersebut secara strategis mengubah posisi mereka dari aktor-aktor kecil dan mengalami kerentanan menjadi sebuah blok regional yang saling berhubungan.

Pada Deklarasi Politik tersebut, para perdana menteri secara eksplisit mengakui bahwa jika mereka tetap berada dalam sistem yang dikelola Rusia merupakan ancaman bagi keamanan negara-negara Baltik (Prime Ministers of the Baltic States 2023). Pertemuan tersebut diadakan karena untuk bisa mengumpulkan kekuatan kolektif bersama Uni Eropa dan mempercepat target sinkronisasi dengan memanfaatkan momentum atas peristiwa invasi Rusia pada Ukraina. Penekanan pada *Baltic Unity* membuktikan bahwa jalur *interstate* dimanfaatkan secara strategis untuk memperkuat solidaritas regional sebagai fondasi sebelum melibatkan aktor lain (Prime Ministers of the Baltic States 2023).

Secara finansial, negara-negara Baltik memanfaatkan saluran *interstate* untuk mengakses sumber daya yang mustahil mereka tanggung sendiri. Dengan membingkai sinkronisasi sebagai proyek vital bagi seluruh Uni Eropa, sehingga dapat membuka akses terhadap pendanaan masif. Kerangka kerja seperti *Baltic Energy Market Interconnection Plan* (BEMIP) yang dibuat pada tahun 2009 menyediakan legitimasi politik awal yang kemudian diperkuat dengan status proyek sebagai *Project of Common Interest* (PCI) Uni Eropa pada tahun 2014 (European Commission 2019). Status PCI ini secara langsung memungkinkan mereka untuk menerima lebih dari 1,2 miliar Euro dari *Connecting Europe Facility*

(CEF) yang dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur jaringan energi, pembangunan interkoneksi antar negara, dan keamanan serta stabilitas jaringan energi (European Commission, t.t.).

Dukungan finansial dari CEF tersebut disalurkan secara bertahap dan strategis. Tahap pertama dimulai pada tahun 2019 dengan hibah sebesar 323 juta Euro yang dialokasikan untuk penguatan jaringan internal di ketiga negara Baltik (European Commission, t.t.). Ini diikuti oleh hibah terbesar dalam sejarah CEF-Energy pada tahun 2020, sebesar 720 juta Euro yang secara spesifik ditujukan untuk infrastruktur lintas batas paling mahal, yaitu pembangunan interkonektor bawah laut Harmony Link dan pemasangan kondensor sinkron (Grzegorzcyk 2020). Tahap akhir pendanaan datang pada Januari 2022 dengan hibah sebesar €170 juta untuk menyelesaikan investasi yang tersisa, seperti peningkatan sistem kontrol teknologi informasi (European Commission, t.t.).

Mekanisme pendanaan melalui CEF ini tidak hanya berlaku untuk sinkronisasi jaringan listrik, tetapi juga untuk proyek-proyek diversifikasi gas yang krusial. Proyek-proyek strategis seperti *Balticconnector* (yang menghubungkan Finlandia ke jaringan gas Eropa) dan *Gas Interconnection Poland-Lithuania* (GIPL) juga menerima pendanaan signifikan dari CEF yang menunjukkan komitmen Uni Eropa di tingkat *interstate* untuk mengakhiri isolasi energi kawasan Baltik secara keseluruhan (European Commission 2022). Total pendanaan tersebut mencapai lebih dari 1,2 miliar Euro bukanlah sekadar bantuan, melainkan *enabling factor* yang memungkinkan pembangunan infrastruktur vital yang tidak mungkin dibiayai oleh anggaran nasional mereka. Dengan menyelaraskan proyek mereka dengan tujuan strategis Uni Eropa, seperti integrasi pasar, keamanan pasokan, dan

dekarbonisasi, mereka berhasil mengubah kerentanan finansial mereka menjadi sebuah proyek yang didukung oleh seluruh blok Eropa (Grigorjana 2025). Dengan demikian, melalui saluran *interstate*, negara-negara Baltik secara strategis berhasil mentransformasikan kelemahan individual mereka menjadi kekuatan kolektif, baik secara politik maupun finansial.

### 3.1.2 Saluran *Transgovernmental*

Dalam konteks negara Baltik, saluran *transgovernmental* bisa dianggap sebagai ruang mesin dari strategi ini. Saluran tersebutlah yang menjelaskan proses kesepakatan politik dan pendanaan diubah menjadi proyek-proyek infrastruktur yang nyata. Para teknokrat dan operator sistem dari berbagai negara berkolaborasi secara langsung untuk mengatasi tantangan teknis yang sangat kompleks, seringkali dengan lebih cepat dan efisien daripada melalui jalur diplomatik formal.

Pada sektor listrik, mekanisme tersebut menjadi tulang punggung dari proyek sinkronisasi. Kolaborasi teknis yang erat antara *Transmission System Operators* (TSO) nasional, seperti Litgrid (Lithuania), *Augstsprieguma Tīkls AS* atau AST (Latvia), Elering (Estonia), dan *Polskie Sieci Elektroenergetyczne* atau PSE (Polandia) sangat krusial (ENTSO-E 2025a). Sebagai sub-unit pemerintah yang bertanggung jawab atas jaringan nasional, kerja sama langsung mereka memungkinkan perancangan, dan implementasi interkonektor lintas batas yang rumit seperti LitPol Link, NordBalt, dan Estlink 1 & 2 (ENTSOE 2019). Organisasi *European Network of Transmission System Operators for Electricity* (ENTSO-E) berfungsi sebagai payung utama bagi hubungan *transgovernmental* tersebut yang menyediakan platform untuk standardisasi teknis, mengatur stabilitas jaringan,

melakukan studi kelayakan, dan mengkoordinasikan proses integrasi yang rumit (ENTSO-E 2025b).

Pola kolaborasi *transgovernmental* yang sama juga terlihat jelas di sektor gas yang vital untuk membongkar monopoli Gazprom. Pembangunan interkonektor gas strategis seperti *Gas Interconnection Poland-Lithuania* (GIPL) dan *Balticconnector* adalah hasil dari kerja sama teknis langsung antara TSO gas nasional masing-masing negara (European Commission 2022). Organisasi payung mereka, *European Network of Transmission System Operators for Gas* (ENTSOG), memfasilitasi koordinasi dan standarisasi di tingkat Eropa. Kolaborasi antarbirokrasi teknis tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Baltik membangun infrastruktur yang diperlukan untuk diversifikasi pasokan, sebuah langkah yang secara langsung mengurangi kerentanan mereka terhadap tekanan energi dari Rusia (ENTSOG, t.t.).

Selain itu, sembilan TSO gas dari negara-negara di sekitar Laut Baltik termasuk *GAZ-SYSTEM* (Polandia), *Elering* (Estonia), *Amber Grid* (Lithuania), dan *Conexus Baltic Grid* (Latvia) menandatangani MoU pada 2024 untuk mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur hidrogen. Inisiatif tersebut bertujuan memanfaatkan potensi produksi hidrogen bersih dari energi terbarukan seperti angin lepas pantai. Para TSO berkomitmen berbagi praktik terbaik dan bekerja sama untuk merancang jaringan hidrogen regional. Kolaborasi tersebut menunjukkan pergeseran peran saluran *transgovernmental* dari respons krisis menjadi upaya untuk membangun masa depan energi yang terdekarbonisasi dan terintegrasi di kawasan (GAZ system 2024).

Kutipan dari Rokas Masiulis, CEO Litgrid, menggambarkan sifat dari kolaborasi ini, yakni

*“Together with our partners, we have agreed on specific actions and dates for disconnecting from the Russian system and joining the Continental European Synchronous Zone. For the first time, the operators of the three countries jointly assumed clear obligations to perform synchronisation at the agreed time February 2025” (Litgrid 2023).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para TSO bukan hanya pelaksana pasif, tetapi juga aktor aktif yang membuat perjanjian teknis yang mengikat di antara mereka sendiri. Pekerjaan teknis yang mereka koordinasikan mencakup tugas-tugas krusial seperti pemasangan kondensor sinkron pertama, pengembangan sistem kontrol, dan rekonstruksi jalur transmisi penting antara Estonia dan Latvia.

### 3.1.3 Saluran *Transnational*

Strategi sinkronisasi negara-negara Baltik juga tidak berhasil tanpa keterlibatan aktor non-negara melalui saluran *transnational*. Saluran tersebut menjadi mekanisme untuk menjawab bagaimana negara-negara Baltik mengatasi kerentanan pasokan energi domestik dan mengakselerasi transisi ke energi terbarukan, mengingat keterbatasan anggaran negara untuk membiayai semua proyek yang diperlukan secara cepat.

Contoh paling menonjol adalah peran perusahaan energi internasional, seperti Ignitis Group. Setelah memutuskan hubungan dengan Rusia, negara-negara Baltik menghadapi defisit kapasitas pembangkit energi yang harus segera diisi. Sebab mengandalkan anggaran negara semata untuk membangun proyek energi terbarukan dalam skala besar akan terlalu lambat dan mahal. Dengan membuka pintu bagi modal dan inovasi swasta, negara-negara Baltik secara efektif mengakselerasi pembangunan kemandirian energi mereka. Peran sentral Ignitis

Group yang melakukan investasi masif dalam proyek-proyek, seperti pembangunan *solar energy* yang dilakukan oleh Latvia dan Lithuania serta *onshore/offshore wind farm* yang dibangun di Estonia dan Lithuania adalah contoh nyata dari upaya aktor non-negara dimanfaatkan untuk mencapai tujuan keamanan nasional (Ignitis Group 2022). Dengan menjadi pionir dalam transisi energi, perusahaan swasta, seperti Ignitis Group berfungsi sebagai akselerator yang tidak dapat dicapai oleh negara sendiri dalam waktu yang singkat.

Mekanisme yang sama juga terlihat dalam diversifikasi pasokan gas. Pembangunan Terminal LNG Klaipėda di Lithuania adalah contoh sempurna dari implementasi saluran *transnational* digunakan untuk memobilisasi teknologi dan keahlian yang tidak dimiliki di dalam negeri. Proyek tersebut menjadi mungkin bukan hanya karena kemauan politik pemerintah Lithuania, tetapi juga karena kemitraan dengan aktor *transnational* seperti perusahaan Lithuania KN Energies yang mengoperasikan teknologi dan kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) yang canggih (KN Energies, t.t.). Selain itu, perusahaan energi Polandia ORLEN menjadi salah satu pengguna utama terminal yang menunjukkan bahwa aktor korporat dari negara lain berkontribusi pada diversifikasi energi regional (ORLEN 2023).

Lembaga keuangan internasional juga memainkan peran penting. Lembaga seperti *European Investment Bank* (EIB) dan *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD) menyediakan pinjaman untuk berbagai proyek energi, termasuk untuk perusahaan swasta yang berinvestasi di sektor energi terbarukan (EBRD 2025). Hal tersebut menunjukkan langkah negara-negara Baltik untuk memanfaatkan saluran *transnational* tidak hanya untuk teknologi dan

implementasi, tetapi juga untuk memobilisasi modal di luar hibah antar-pemerintah. Dengan demikian, keterlibatan aktor-aktor tersebut menunjukkan mekanisme negara-negara Baltik berhasil memobilisasi teknologi, keahlian, dan modal dari sektor swasta internasional untuk mencapai tujuan strategis mereka.

Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa strategi sinkronisasi negara-negara Baltik tidak mungkin berhasil jika hanya mengandalkan satu jalur interaksi saja. Sebaliknya, keberhasilan mereka terletak pada bagaimana mereka secara cerdas dan bersama memanfaatkan ketiga saluran untuk tujuan yang berbeda namun saling melengkapi.

Melalui saluran *interstate*, mereka berhasil mengubah posisi mereka yang tadinya lemah menjadi memiliki kekuatan kolektif, mengamankan sumber daya finansial masif dari Uni Eropa yang menjadi prasyarat mutlak bagi proyek ini. Saluran *transgovernmental* berfungsi sebagai ruang mesin dari strategi ini, yaitu kolaborasi teknis langsung antar TSO yang difasilitasi oleh organisasi payung seperti ENTSO-E dan ENTSOG adalah mekanisme yang menerjemahkan kesepakatan politik tingkat tinggi menjadi infrastruktur fisik yang fungsional di lapangan. Saluran *transnational* ini dapat memobilisasi sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara, yaitu modal investasi, teknologi canggih, dan keahlian dari sektor swasta. Keterlibatan perusahaan seperti Ignitis Group dan KN Energies, serta lembaga keuangan seperti EBRD menunjukkan proses negara-negara Baltik secara efektif mengakselerasi transisi energi mereka dengan cara yang tidak mungkin dicapai hanya dengan anggaran negara.

**Tabel 2. Proyek Infrastruktur Sinkronisasi Tahun 2022**

<b>Negara</b>	<b>Proyek</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>Lithuania, Latvia, Estonia, Polandia</b>	Sinkronisasi Jaringan Listrik	Proyek keseluruhan menerima lebih dari 1,2 miliar Euro dari dana Uni Eropa melalui CEF.
<b>Lithuania &amp; Polandia</b>	<i>Harmony Link</i>	Interkonektor listrik bawah laut HVDC ini menerima hibah CEF sebesar 493 juta Euro.
<b>Lithuania &amp; Polandia</b>	<i>Gas Interconnection Poland-Lithuania (GIPL)</i>	Proyek pipa gas strategis ini menerima hibah CEF sebesar 272 juta Euro.
<b>Estonia &amp; Finlandia</b>	<i>Balticconnector</i>	Interkonektor gas ini menerima hibah CEF sebesar 188 juta Euro.
<b>Lithuania &amp; Polandia</b>	LitPol Link	Interkonektor listrik pertama antara Baltik dan Eropa. Dibangun dan dioperasikan melalui kerja sama teknis yang erat antara TSO Litgrid dan PSE. menerima hibah sebesar 27 juta Euro dari CEF.
<b>Lithuania &amp; Swedia</b>	NordBalt	Kabel listrik bawah laut yang menghubungkan Baltik dengan pasar Nordik. Merupakan hasil kolaborasi teknis antara TSO Litgrid dan Svenska Kraftnät. didukung oleh hibah CEF sebesar 131 juta Euro.
<b>Estonia &amp; Finlandia</b>	Estlink 1 & 2	Dua kabel listrik bawah laut yang mengintegrasikan pasar listrik Baltik dan Nordik. Dibangun melalui kerja sama TSO Elering dan Fingrid dan telah menerima hibah dari CEF sebesar 100 juta Euro.
<b>Latvia</b>	Peningkatan Penyimpanan Gas Inčukalns	Proyek untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan fasilitas penyimpanan gas bawah tanah Dilaksanakan oleh TSO gas Latvia dan didukung oleh dana CEF.
<b>Lithuania</b>	Terminal LNG Klaipėda & Terminal LNG Świnoujście	Berperan besar dalam diversifikasi gas dan mendapatkan dana sebesar 79 juta Euro dari CEF dan 354 juta Euro dari ERDF.

Sumber: *European Commission* (2022)

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Lithuania memang lebih sering memimpin proyek-proyek kunci. Melihat pada koordinasi peran strategis dalam satu blok yang utuh, peran dominan Lithuania dalam proyek seperti yang tertera di Tabel 2 bukanlah tanda superioritas, melainkan dari lokasi geografis dan infrastruktur, ia berfungsi sebagai penghubung utama ke Uni Eropa. Sementara itu, Estonia berperan sebagai gerbang utara yang menghubungkan pasar Nordik melalui Estlink, dan Latvia bertindak sebagai penyeimbang regional dengan fasilitas penyimpanan gas Inčukalns yang krusial bagi keamanan pasokan seluruh kawasan (European Commission 2022). setiap negara memainkan peran yang paling sesuai dengan keunggulan mereka dan proyek yang dipimpin satu negara secara fundamental dirancang untuk mengamankan seluruh blok Baltik. Oleh karena itu, pembagian tugas tersebut justru menjadi bukti kuat adanya sebuah strategi regional yang terkoordinasi. Tabel 2 di atas menjelaskan terkait serangkaian proyek infrastruktur strategis yang menjadi implementasi nyata dari upaya sinkronisasi dan diversifikasi energi negara-negara Baltik pada tahun 2022. Proyek-proyek tersebut mencakup dua sektor penting, yakni listrik dan gas. Di sektor listrik, pembangunan interkonektor kunci seperti *Harmony Link*, *LitPol Link*, *NordBalt*, dan *Estlink 1 & 2* menjadi tulang punggung integrasi dengan jaringan Uni Eropa dan Nordik (European Commission 2022).

Disisi lain pada sektor gas, proyek seperti *GIPL*, *Balticconnector*, dan pembangunan terminal LNG di Klaipėda serta Świnoujście bertujuan untuk membongkar monopoli pasokan historis. Pendanaan dari Uni Eropa, terutama melalui CEF dengan total dukungan melebihi 1,2 miliar Euro, berfungsi sebagai

*enabling factor* yang memungkinkan negara-negara Baltik untuk menjalankan proyek-proyek berbiaya tinggi tersebut (European Commission 2022).

Keberadaan *Multiple Channels* menjadi sebuah pondasi yang dimanfaatkan oleh negara Baltik untuk menjalankan serangkaian *political processes* bagi keberhasilan strategi sinkronisasi. Negara Baltik menunjukkan bagaimana setiap saluran dioptimalkan untuk fungsi strategis yang berbeda dalam mencapai tujuan diversifikasi energi.

Pertama, melalui saluran *interstate*, negara Baltik melakukan *political processes* berupa *agenda setting* tingkat EU. Melalui mekanisme pembentukan front persatuan dalam *Joint Declaration of The Prime Ministers of The Baltic States* pada Agustus 2023, mereka berhasil mentransformasikan isu sinkronisasi dari masalah teknis regional menjadi prioritas keamanan mendesak pasca-invasi Rusia Ukraina (Prime Ministers of the Baltic States 2023). Atas transformasi krusial tersebut mereka berhasil menempatkan isu tersebut di puncak agenda politik UE dan terlihat pada diangkatnya proyek sinkronisasi menjadi PCI oleh UE.

Perpindahan arena isu menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan perhatian politik dari Uni Eropa, melalui kerangka BEMIP, mereka berhasil melakukan *agenda setting* dan memobilisasi proyek sinkronisasi dengan memanfaatkan instrumen kebijakan negara (*instrument of state policy*) dalam bentuk mekanisme kelembagaan dan finansial regional, khususnya melalui CEF yang mengalokasikan lebih dari 1,2 miliar Euro untuk mendukung sinkronisasi yang menjadi kunci untuk negara Baltik bisa melakukan sinkronisasi, yaitu finansial (European Commission, t.t.). Tanpa proses *agenda setting* yang berhasil melalui saluran *interstate* ini, sumber daya sebesar itu akan sulit untuk didapatkan.

Kedua, saluran *transgovernmental* menjadi krusial untuk proses politik berupa koordinasi teknis dan implementasi kebijakan lintas batas. Mekanismenya adalah melalui kolaborasi langsung antara TSO nasional negara Baltik dan TSO Polandia di bawah payung organisasi internasional seperti ENTSO-E, memobilisasi mereka untuk dapat mengatasi tantangan teknis yang rumit dalam membangun interkonektor lintas batas seperti LitPol Link dan Harmony Link (ENTSOE 2019). Proses tersebut menunjukkan penggunaan *instrument of state policy* berupa keahlian teknokratis dan jaringan birokrasi yang berjalan seiringan dan seringkali lebih efisien, dibandingkan melewati jalur diplomatik formal, karena jika hanya melalui diplomatik formal proyek teknis sinkronisasi ini akan sulit untuk di mobilisasi dan dipercepat. Hal tersebut adalah contoh nyata bagaimana negara dapat meminjam keahlian dari mitra melalui hubungan langsung antar lembaga teknis yang beroperasi dalam kerangka organisasi internasional.

Ketiga, saluran *transnational* dimanfaatkan untuk proses politik dalam memobilisasi sumber daya dan juga inovasi dari aktor non-negara. Negara Baltik menyadari adanya keterbatasan anggaran dan kapasitas teknologi domestik, mereka secara strategis memiliki mekanisme untuk menarik investasi dari Perusahaan energi swasta seperti Ignitis Group untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan (Ignitis Group 2022). Selain itu mereka juga menggandeng keahlian teknis perusahaan seperti KN Energies untuk mengoperasikan terminal LNG Klaipėda (KN Energies, t.t.). Keterlibatan lembaga keuangan internasional seperti EIB dan EBRD juga menunjukkan bagaimana *goals of actors* yang berbeda (profitabilitas perusahaan, keamanan energi negara) dapat diselaraskan. Hal tersebut sekaligus merupakan contoh penggunaan instrumen kebijakan oleh negara

Baltik yang berupa kemitraan publik/swasta yang dimungkinkan oleh keterbukaan lintas batas.

Dengan demikian, *political processes* dalam strategi sinkronisasi energi negara-negara Baltik memperlihatkan bagaimana kekuasaan diterjemahkan melalui koordinasi lintas aktor dan lintas level, bukan melalui paksaan militer. Hal tersebut mencerminkan logika utama *Complex Interdependence*, di mana hasil politik ditentukan oleh kemampuan negara mengelola jejaring saling ketergantungan yang kompleks melalui berbagai saluran interaksi.

Secara keseluruhan, analisis proses politik ini menunjukkan bahwa *multiple channels* adalah arena dinamis di mana negara Baltik mengimplementasikan berbagai *political processes*. Mereka tidak hanya mengandalkan satu jalur, tetapi mengkombinasikan kekuatan dari jalur *interstate* (untuk legitimasi politik dan pendanaan), *transgovernmental* (untuk implementasi teknis), dan *transnational* (untuk modal, teknologi, dan inovasi) guna mencapai tujuan strategis diversifikasi energi mereka. Kemampuan memanfaatkan jejaring kompleks tersebut yang menjadi inti dari strategi mereka dalam kondisi interdependensi kompleks.

### **3.2 *Absence of Hierarchy Among Issues***

Strategi sinkronisasi jaringan energi negara-negara Baltik dengan Eropa merupakan sebuah contoh dari konsep *Absence of Hierarchy Among Issues*. Teori tersebut menentang pandangan Realis tradisional yang secara tegas memisahkan *high politics* (isu keamanan militer) dari *low politics* (isu ekonomi, teknis, dan lingkungan) (Keohane dan Nye 2012, 19-22). Dalam kasus Baltik, isu infrastruktur energi yang secara historis dianggap sebagai *low politics*, mengalami proses

perpindahan isu menjadi isu keamanan nasional yang setara vitalnya dengan pertahanan militer (*high politic*). Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi katalisator yang menegaskan bahwa ketergantungan energi pada Rusia adalah sebuah kerentanan (Krūkle 2024). Proyek sinkronisasi ini membuktikan bahwa dalam lanskap geopolitik kontemporer, pilar keamanan, ekonomi, teknis, dan lingkungan tidak dapat dipisahkan sebab kegagalan pada satu pilar akan meruntuhkan keseluruhan strategi kedaulatan.

Pilar keamanan adalah pendorong utama di balik proyek sinkronisasi. Ancaman Rusia berevolusi dari pemerasan pasokan di masa lalu menjadi perang hibrida yang lebih kompleks dan sulit diatribusikan (Pilot 2025). Setelah negara-negara Baltik mengurangi ketergantungan impor melalui proyek, seperti terminal LNG Klaipeda Lithuania, Rusia menggunakan cara-cara yang tidak sampai memicu respons militer langsung dari NATO (Bajarūnas 2024). Taktik tersebut mencakup sabotase infrastruktur kritis bawah laut, seperti kerusakan pada pipa gas *Balticconnector* dan kabel listrik Estlink 2 yang diduga kuat dilakukan oleh kapal-kapal yang terkait dengan armada bayangan Rusia (Cicchetti 2025).

Selain itu, serangan siber yang menargetkan perusahaan energi, seperti Ignitis di Lithuania dan kampanye disinformasi yang bertujuan merusak kepercayaan publik menjadi sebuah ancaman yang konstan (Bajarūnas 2025). Menghadapi berbagai ancaman tersebut, keamanan energi tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis, melainkan sebagai komponen inti dari pertahanan nasional. Hal ini mendorong NATO untuk meluncurkan Operasi '*Baltic Sentry*', sebuah misi khusus untuk melindungi infrastruktur bawah laut, yang menegaskan bahwa keamanan energi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam postur pertahanan

kolektif (Cicchetti 2025). Namun, tujuan keamanan yang mendesak tersebut tidak dapat dilakukan secara individual sebab harus diseimbangkan dengan realitas ekonomi domestik.

Dimensi ekonomi dari sinkronisasi mencerminkan biaya tambahan yang harus dibayar untuk negara-negara Baltik. Dengan total biaya proyek mencapai hampir 2 miliar Euro investasi tersebut tidak mungkin terwujud tanpa dukungan strategis dari Uni Eropa. Melalui CEF, UE mendanai lebih dari €1,2 miliar (sekitar 75% dari total biaya), sebuah langkah yang secara efektif merupakan investasi geopolitik untuk memperkuat perbatasan timurnya dan melawan pengaruh Rusia (Grigorjana 2025). Namun, transisi tersebut membebankan biaya jangka pendek yang signifikan pada masyarakat. Guncangan harga energi akibat perang di Ukraina menyebabkan volatilitas ekstrem dengan harga listrik di bursa Nord Pool sempat mencapai rekor €1.896 per MWh pada jam puncak di Januari 2024 (AST 2024).

**Tabel 3. Tingkat Inflasi Tahunan Negara Baltik Tahun 2022-2024**

Negara	2022	2023	2024
Estonia	19.4%	9.1%	3.7%
Lithuania	18.9%	8.7%	0.9%
Latvia	17.2%	9.1%	1.3%

Sumber: *Macrobond, Scope Ratings (2025)*

Pada Tabel 2 menunjukkan adanya proses stabilisasi yang sejalan dengan percepatan strategi desinkronisasi. Menurut data dari Scope Ratings, tingkat inflasi di negara-negara Baltik menunjukkan penurunan yang sangat signifikan setelah puncaknya pada tahun 2022. Di Estonia, inflasi turun dari 19,4% pada 2022 menjadi 9,1% pada 2023 dan diperkirakan 3,7% pada 2024. Pola serupa terjadi di Latvia dari 17,2% ke 9,1%, lalu ke 1,3% dan Lithuania dari 18,9% ke 8,7%, lalu ke 0,9%. Penurunan drastis tersebut yang membawa tingkat inflasi mereka mendekati

atau bahkan di bawah rata-rata Zona Euro pada tahun 2024 dapat diinterpretasikan sebagai bukti awal keberhasilan strategi diversifikasi.

Dengan melepaskan diri dari pasokan energi Rusia yang dipolitisasi dan terintegrasi dengan pasar Eropa yang lebih stabil, mereka berhasil meredam salah satu sumber utama volatilitas harga yang memicu krisis inflasi sebelumnya (Ratings 2025). Di tengah tekanan keamanan eksternal dan tantangan ekonomi internal, terdapat pilar ketiga yang menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan strategi ini, yaitu keandalan teknis. Tanpa solusi teknis yang kuat, tujuan keamanan dan stabilitas ekonomi tidak akan bisa tercapai.

Secara teknis, tantangan terbesar adalah melepaskan diri dari stabilitas yang disediakan oleh jaringan listrik Rusia-Belarusia. Sistem yang besar secara alami memiliki kapasitas penstabil alami yang tinggi, kemampuan untuk menahan perubahan frekuensi mendadak yang berfungsi sebagai bantalan saat terjadi gangguan. Untuk beroperasi secara mandiri, sistem Baltik, yang jauh lebih kecil, harus menciptakan kapasitas penstabilnya sendiri (Kardaś 2025). Solusi teknis utama untuk tantangan ini adalah pemasangan sembilan kondensor sinkron di ketiga negara (Cook 2025).

Perangkat tersebut berfungsi sebagai jantung mekanis yang menyediakan kapasitas penstabil buatan, menstabilkan frekuensi dan memastikan keandalan jaringan tanpa bergantung pada kendali Rusia. Pemasangan perangkat tersebut adalah perwujudan fisik dari kemerdekaan operasional. Selain itu, penguatan interkoneksi dengan Eropa, seperti LitPol Link dan proyek Harmony Link di masa depan, menjadi krusial untuk redundansi. Namun, interkoneksi ini juga menjadi titik kerentanan baru terhadap sabotase yang kembali mengikat isu teknis secara

langsung dengan isu keamanan (Pilot 2025). Disisi lain, kebutuhan untuk mengatasi tantangan keamanan, ekonomi, dan teknis tersebut secara tidak langsung menciptakan sinergi dengan pilar keempat yang seringkali dianggap sebagai agenda jangka panjang, yaitu lingkungan dan transisi hijau.

Dorongan untuk mencapai kemandirian energi dari Rusia secara tidak langsung menjadi katalisator kuat bagi transisi hijau di kawasan Baltik. Isu lingkungan yang dianggap kurang menjadi prioritas, justru mendapatkan keuntungan dari kebutuhan strategis geopolitik. Sinkronisasi dengan jaringan Eropa adalah prasyarat teknis yang memungkinkan integrasi energi terbarukan dalam skala besar, seperti angin dan surya. Kebutuhan untuk menjamin keamanan pasokan mempercepat investasi dalam teknologi bersih dan menyelaraskan tujuan keamanan nasional dengan komitmen iklim. Hasil dari upaya tersebut adalah akselerasi dekarbonisasi yang signifikan.

Pada tahun 2018, negara-negara Baltik masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk lebih dari 60% listrik mereka, kini mereka mendapatkan 72% dari sumber terbarukan (Santaella 2025). Komitmen tersebut terlihat dari target ambisius, seperti tujuan Estonia untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dan keberhasilannya memproduksi lebih banyak listrik dari sumber terbarukan daripada bahan bakar fosil untuk pertama kalinya pada tahun 2023 (Hartwell dan Rakstyle 2025, 7). Dengan demikian, isu lingkungan tidak lagi menjadi agenda terpisah, melainkan pilar yang menyatu dengan keamanan dan membuktikan bahwa kebijakan keamanan dapat secara langsung mendorong pencapaian tujuan iklim

Kondisi *Absence of Hierarchy Among Issues* secara fundamental membentuk *political processes* yang harus dijalankan oleh negara-negara Baltik.

Mereka tidak bisa lagi memprioritaskan satu isu di atas yang lain, melainkan harus mengelola serangkaian tujuan yang kompleks dan seringkali bersaing secara bersamaan.

*Political processes* yang paling terlihat di sini ialah *issue linkage*, karena isu keamanan (lepas dari Rusia) tidak dapat dipisahkan dari isu ekonomi (biaya proyek), isu teknis (keandalan jaringan), dan juga isu lingkungan (transisi hijau) negara Baltik mengaitkan isu-isu tersebut untuk dapat membangun dukungan dan membantu mereka mengelola proyek sinkronisasi. Mereka berhasil mengaitkan kebutuhan mendesak akan keamanan energi dengan agenda jangka panjang UE untuk integrasi pasar dan dekarbonisasi. Contohnya, para petinggi kawasan Baltik berargumen bahwa sinkronisasi tidak hanya meningkatkan keamanan regional tetapi juga akan memfasilitasi penyerapan energi terbarukan dalam skala besar yang menjadi poin untuk meyakinkan Komisi Eropa agar memberikan dukungan finansial yang signifikan melalui CEF (Grigorjana 2025). Pengaitan tersebut juga merupakan contoh nyata dari instrumen kebijakan non-militer yang dilakukan negara Baltik.

Selain itu, ketiadaan hierarki antar isu ini memaksa para pembuat kebijakan Baltik untuk terus menyeimbangkan tujuan para aktor yang beragam. Mereka harus merespons tekanan keamanan eksternal dari Rusia, sambil mengelola dampak ekonomi domestik seperti volatilitas harga listrik dan inflasi (Ratings 2025). Negara Baltik memenuhi persyaratan teknis yang rumit untuk dapat menyinkronkan jaringan mereka ke UE, yaitu pemasangan 9 kondensor sinkron dan tetap berkomitmen pada target lingkungan dari UE (Cook 2025). Proses penyeimbangan tersebut melibatkan negosiasi intensif baik pada tingkat domestik maupun

internasional dengan mitra Eropa. Keberhasilan strategi sinkronisasi tidak dapat diukur dari pencapaian tujuan tunggal saja, melainkan dari kemampuan mengelola *trade-off* dan menciptakan sinergi di antara berbagai agenda yang bersaing.

Dengan demikian, *Absence of Hierarchy Among Issues* bukan hanya deskripsi kondisi, tetapi arena di mana proses politik negosiasi, pengaitan isu, dan penyeimbangan tujuan terjadi secara terus-menerus. Kemampuan negara Baltik untuk menavigasi kompleksitas ini adalah inti dari strategi mereka dalam mengelola interdependensi.

### **3.3 *Minor Role of Military Force***

*Minor Role of Military Force* menjadi kunci untuk memahami negara-negara Baltik secara strategis memilih jalur institusional ketimbang konfrontasi. Penting untuk dipahami bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh Keohane dan Nye, peran kecil ini tidak berarti kekuatan militer menjadi tidak relevan dalam semua aspek politik internasional. Sebaliknya, konsep tersebut merujuk pada kondisi kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen yang efektif atau dapat digunakan oleh pemerintah terhadap pemerintah lain dalam isu-isu spesifik ketika interdependensi kompleks berlaku (Keohane dan Nye 2012, 21-23).

Dalam kasus sinkronisasi energi, negara-negara Baltik memang memilih jalur non-militer sebagai strategi utama untuk menyelesaikan masalah ketergantungan infrastruktur. Pilihan tersebut bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kalkulasi cost-benefit yang rasional, karena menggunakan instrumen diplomasi dan ekonomi di dalam arena hubungan dengan mitra Eropa jauh lebih efektif. Namun, ini tidak berarti peran militer hilang sama sekali.

Sebaliknya, peran militer bertransformasi menjadi lebih kecil dan bersifat defensif, yaitu sebagai pelindung aset-aset energi kritis. Hal tersebut terbukti ketika NATO meluncurkan Operasi '*Baltic Sentry*', sebuah misi khusus untuk melindungi infrastruktur bawah laut. Kehadiran militer di sini bukanlah sebagai alat untuk memaksa atau bernegosiasi, melainkan sebagai jaminan keamanan di latar belakang, sebuah peran yang justru menegaskan konsep (Cicchetti 2025).

Konfrontasi militer melawan Rusia tidak hanya akan meningkatkan kerentanan fisik dan eksistensial mereka secara fatal, tetapi juga merupakan instrumen yang sama sekali tidak efektif untuk menyelesaikan masalah ketergantungan infrastruktur. Sebaliknya, alasan mereka memilih jalur non-militer adalah karena di arena inilah mereka jauh lebih mendapatkan keuntungan (Keohane dan Nye 2012, 21).

Strategi di balik pilihan negara Baltik pada jalur non-militer didasari oleh sebuah kalkulasi mengenai konsekuensi dan peluang yang mereka hadapi. Di satu sisi, menempuh jalur konfrontasi militer akan membawa konsekuensi yang fatal. Terdapat asimetri kekuatan yang ekstrem yang membuat eskalasi militer hampir pasti berujung pada kekalahan dan kehancuran ekonomi dan teknis. Disisi lain, jalur non-militer melalui diplomasi dan hukum menawarkan peluang strategis yang jauh lebih besar untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu kemandirian energi sambil tetap menjaga stabilitas regional. Pilihan tersebut menjadi semakin rasional karena integrasi dengan Eropa juga secara langsung menjadi jawaban atas berbagai risiko non-militer yang selama ini mereka hadapi dari Rusia, seperti monopoli harga energi dan kampanye propaganda yang intensif (Tatarélytè 2025).

Strategi institusional menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal juga diperkuat oleh posisi geopolitik negara Baltik yang sangat kritis. Negara-negara Baltik adalah satu-satunya anggota NATO yang pernah secara langsung menjadi bagian dari Uni Soviet dan memiliki populasi minoritas Rusia. Posisi negara Baltik berpotensi menjadi tempat ancaman di sayap timur laut NATO yang ditakutkan akan terjadi serangan militer di wilayah mereka. Oleh karena itu, tidak hanya akan terbatas pada kehancuran kawasan Baltik, namun akan berisiko memicu konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan NATO. Menghadapi risiko konfrontasi tersebut, implementasi dari strategi non-militer melalui diplomasi dan hukum menjadi sebuah keharusan (Bloomberg 2025).

Deklarasi Politik 2023 yang ditandatangani bersama Komisi Eropa dan Polandia adalah contoh nyata dari bagaimana mereka secara aktif menggunakan keanggotaan institusional mereka untuk menggalang dukungan politik kolektif dan mengubah isu energi menjadi komitmen bersama seluruh kawasan, sehingga memperkuat tameng mereka tanpa harus menempuh jalur militer yang berbahaya (Prime Ministers of the Baltic States 2023).

Jalur non-militer menjadi pilihan yang paling efektif dan rasional juga diperkuat oleh adanya dua karakteristik interdependensi lainnya. Keberadaan *Multiple Channels* dan *Absence of Hierarchy Among Issues* secara fundamental mengubah kalkulasi strategis negara Baltik. Keterlibatan berbagai aktor non-militer seperti Uni Eropa dengan pendanaan CEF-nya, TSO dengan keahlian teknisnya, dan investor swasta, seperti Ignitis Group menciptakan sebuah jaringan kepentingan yang luas. Para aktor tersebut memiliki kepentingan utama pada stabilitas ekonomi dan teknis, bukan pada konfrontasi militer. Konsekuensinya,

setiap eskalasi militer akan secara langsung merusak kepentingan semua aktor dalam jaringan tersebut yang kemudian menciptakan tekanan kuat bagi para pemimpin Baltik untuk tetap menempuh jalur damai. Dengan demikian, strategi pertahanan mereka didefinisikan ulang keamanan tidak lagi hanya dicapai melalui kekuatan militer, tetapi melalui investasi strategis pada infrastruktur untuk mencapai kedaulatan teknis yang sesungguhnya (BalticTimes 2021).

Meskipun pemicu desinkronisasi adalah isu keamanan, negara Baltik secara sadar menghindari konfrontasi bersenjata. Sebaliknya, negara-negara Baltik memilih untuk mengandalkan instrumen-instrumen non-militer, seperti diplomasi multilateral yang terkoordinasi, pemanfaatan jalur hukum untuk memutus kontrak energi, dan investasi strategis di bidang teknis-ekonomi sebagai upaya pertahanan. Dengan cara tersebut, mereka berhasil mengalihkan lingkup persaingan ke ranah diplomatik, hukum, dan ekonomi sebab negara Baltik memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Upaya tersebut memperkuat argumen utama dari teori Interdependensi Kompleks yang menyatakan bahwa dalam dunia yang saling terhubung dan kekuatan efektif tidak lagi dimonopoli oleh militer, melainkan oleh kemampuan mengelola jaringan non-militer.

Oleh karena itu, strategi negara-negara Baltik memilih untuk menggunakan respons non-militer adalah sebuah keputusan strategis yang didasari oleh analisis *cost-benefit* yang terukur dan diperkuat oleh struktur interdependensi yang ada. Negara-negara baltik sadar memindahkan arena persaingan dari ranah militer ke ranah institusional, seperti hukum, dan ekonomi akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat sebagai bagian dari Eropa. Realitas ini memperkuat argumen Keohane dan Nye bahwa dalam dunia yang saling terhubung, kekuatan efektif tidak

lagi dimonopoli oleh militer, melainkan oleh kemampuan mengelola jaringan non-militer.

Kondisi *Minor Role of Military Force* mendorong negara-negara Baltik untuk menjalankan *political processes* yang berfokus pada instrumen non-militer dan pemanfaatan arena institusional. Langkah tersebut bukan sekadar akibat keterbatasan kemampuan pertahanan, melainkan hasil kalkulasi untuk beroperasi di arena di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Alih-alih mengandalkan ranah militer untuk menekan Rusia yang dinilai tidak efektif, negara Baltik secara sadar memilih *instruments of state policy* yang bersifat diplomatik, hukum, dan teknis-ekonomi. Melalui diplomasi multilateral, mereka membangun koalisi politik di dalam Uni Eropa seperti terlihat pada *Joint Declaration of the Prime Ministers of the Baltic States* (2023). Jalur hukum dan kelembagaan Uni Eropa dimanfaatkan untuk mendukung langkah desinkronisasi sekaligus memperoleh dukungan finansial melalui CEF, sementara investasi strategis di bidang infrastruktur energi seperti interkonektor, kondensor sinkron, dan terminal LNG menjadi bentuk pertahanan non-militer (energi) yang memperkuat kedaulatan teknis mereka.

Pilihan instrumen tersebut bisa diwujudkan karena peran organisasi internasional, khususnya Uni Eropa, menjadi arena utama bagi negara-negara Baltik. Uni Eropa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai forum legitimasi dan pembentukan koalisi politik yang memperkuat posisi tawar Baltik. Melalui mekanisme regulasi dan pasar energi UE, mereka menciptakan tekanan non-militer yang secara bertahap mengurangi pengaruh Rusia, sekaligus mengalihkan fokus persaingan dari ranah militer ke ranah institusional. Bahkan keterlibatan militer yang tersisa, seperti operasi *Baltic Sentry*

oleh NATO untuk melindungi infrastruktur bawah laut bersifat defensif dan mendukung strategi institusional (Cicchetti 2025).

Secara keseluruhan, strategi desinkronisasi energi Baltik membuktikan bahwa ketiga karakteristik *Complex Interdependence* tidak hanya terjadi, tetapi juga bekerja secara sinergis untuk membentuk pilihan strategis mereka. Negara-negara Baltik memanfaatkan berbagai saluran interaksi pada *Multiple Channels* sebagai langkah membangun koalisi politik dan teknis, *Absence of Hierarchy among issues* dengan menyeimbangkan berbagai tuntutan, *Minor Role of Military Force* dengan menunjukkan peran minimal pada kekuatan militer sebagai solusinya. Sebagai negara kecil, kemampuan untuk meminjam kekuatan dari jaringan aktor Eropa, melalui sektor finansial dari Uni Eropa, keahlian dari TSO, maupun standar dari ENTSO-E menjadi strategi pertahanan yang paling krusial. Keberhasilan dalam mengelola berbagai saluran inilah yang kemudian memperkuat dua kondisi lainnya, yakni adanya agenda yang kompleks dan membuat opsi militer menjadi semakin tidak relevan.

**Tabel 4. Analisis Interdependensi Kompleks Negara Baltik dengan Eropa**

Karakteristik Teori	Strategi	Implementasi
<i>Multiple Channels</i>	Mengatasi defisit kapabilitas domestik (finansial, teknis, politik) dengan secara sistematis memobilisasi jaringan aktor Eropa yang beragam, alih-alih bertindak sendiri.	<b>Interstate:</b> Mengamankan legitimasi politik melalui kesepakatan tingkat Perdana Menteri dan memperoleh pendanaan masif 1,2 miliar Euro dari Uni Eropa melalui mekanisme CEF, BEMIP, dan status PCI.
		<b>Transgovernmental:</b> Kolaborasi teknis langsung antar TSO (Litgrid, AST, Elering, PSE) di bawah payung ENTSO-E/G untuk merancang dan membangun interkonektor serta merencanakan infrastruktur hidrogen masa depan.
		<b>Transnational:</b> Memobilisasi modal, teknologi, dan keahlian dari aktor non-negara seperti Ignitis Group (energi

		terbarukan), KN Energies (Terminal LNG), dan lembaga keuangan (EIB, EBRD).
<i>Absence of Hierarchy Among Issues</i>	Menjalankan strategi secara holistik dengan mengelola empat pilar, keamanan, ekonomi, teknis, dan lingkungan sebagai prioritas yang setara dan saling terkait, untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang (lingkungan dan transisi hijau) dan mencegah timbulnya kerentanan baru.	<b>Keamanan:</b> Merespons perang hibrida Rusia (sabotase, siber) dengan mengintegrasikan keamanan energi ke dalam pertahanan nasional dan mendorong peluncuran Operasi 'Baltic Sentry' oleh NATO.
		<b>Ekonomi:</b> Mengelola biaya proyek yang sangat tinggi hampir 2 miliar Euro dengan dukungan UE, sambil mengatasi dampak domestik seperti lonjakan harga listrik dan inflasi yang mencapai di atas 20%.
		<b>Teknis:</b> Mengatasi hilangnya stabilitas jaringan dari sistem Rusia dengan memasang sembilan kondensor sinkron untuk menciptakan kapasitas penstabil buatan dan memastikan keandalan operasional.
		<b>Lingkungan:</b> Menggunakan urgensi geopolitik sebagai katalisator untuk mempercepat transisi hijau, menyelaraskan tujuan keamanan dengan komitmen EU dan meningkatkan energi terbarukan hingga 72%.
<i>Minor Role of Military Force</i>	Menghindari risiko eskalasi militer dengan Rusia. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan arena yang berpotensi militer, yaitu Rusia ke arena yang lebih diplomatis, yakni Uni Eropa yang dianggap oleh Negara Baltik lebih mempunyai keuntungan dibandingkan Rusia.	<b>Pemanfaatan Institusi dengan menggunakan jalur diplomasi:</b> Menggunakan keanggotaan dari Negara Baltik di Uni Eropa dan NATO untuk menciptakan ketahanan politik kolektif. Hal ini dikarenakan jika adanya ancaman pada proses sinkronisasi jaringan energi, secara tidak langsung seluruh blok Uni Eropa juga akan terlibat.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari analisis terhadap warisan ketergantungan energi negara-negara Baltik pada Rusia, sebuah kondisi interdependensi asimetris dari era Soviet yang terbukti tidak dapat dipertahankan. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 berfungsi sebagai katalisator yang menegaskan betapa tingginya biaya kepekaan berupa guncangan inflasi dan risiko teknis seketika dan biaya kerentanan berupa politisasi energi serta hilangnya kedaulatan yang harus mereka tanggung. Kondisi inilah yang menciptakan sebuah keharusan strategis bagi negara-negara Baltik untuk secara fundamental mengubah kerangka keamanan energi mereka.

Menjawab rumusan masalah, penelitian ini membuktikan bahwa strategi sinkronisasi energi negara Baltik bukanlah sekadar respons teknis, melainkan sebuah manajemen interdependensi. Alih-alih hanya merespons ancaman Rusia, mereka secara strategis menukar satu bentuk interdependensi yang bersifat asimetris dan tunggal dengan Rusia, menjadi bentuk interdependensi lain yang lebih terdiversifikasi, dapat dikelola, dan berbasis aturan bersama Uni Eropa.

Mekanisme strategis dari negara Baltik dapat dijelaskan secara baik melalui kerangka *Complex Interdependence*, keberhasilan negara Baltik terletak pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan karakteristik yang ada untuk menjalankan *political processes* yang strategis. Pertama, pemanfaatan *multiple channels* terbukti sangat krusial, karena melalui saluran *interstate* mereka mengamankan legitimasi politik dan pendanaan masif lebih dari €1,2 miliar dari

Uni Eropa. Melalui saluran *transgovernmental*, para Operator Sistem Transmisi (TSO) berkolaborasi secara teknis di bawah payung ENTSO-E untuk membangun interkonektor vital seperti Harmony Link. Sementara itu, saluran *transnational* berhasil memobilisasi modal dan teknologi dari sektor swasta seperti Ignitis Group. Kedua, dalam karakteristik *Absence of Hierarchy Among Issues*, mereka berhasil menyeimbangkan empat pilar yang saling bersaing, yaitu keamanan, ekonomi, teknis, dan lingkungan yang mendorong proses politik berupa *issue linkage*. Mereka secara strategis mengaitkan kebutuhan keamanan energi dengan agenda transisi hijau UE, sehingga investasi pada energi terbarukan menjadi selaras dengan tujuan geopolitik. Ketiga, *Minor Role of Military Force* sebagai kondisi dasar yang mengarahkan mereka untuk memilih instrumen kebijakan non-militer. Alih-alih melakukan konfrontasi, mereka memindahkan arena persaingan ke dalam institusi UE, memaksimalkan peran organisasi internasional sebagai arena untuk negosiasi dan membangun koalisi.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi studi Hubungan Internasional, khususnya dalam menunjukkan bagaimana negara kecil dapat secara strategis memanfaatkan kerangka multilateralisme dan jejaring lintas-batas untuk mengubah struktur ketergantungan dan meningkatkan otonomi mereka dalam menghadapi kekuatan besar. Lebih dari itu, penelitian ini membuktikan bahwa kerangka *Complex Interdependence* dapat digunakan tidak hanya untuk mendeskripsikan kondisi, tetapi juga untuk menganalisis pilihan dan eksekusi strategi kebijakan luar negeri yang transformatif di abad ke-21.

## 4.2 Rekomendasi

Penelitian ini telah memberikan analisis mengenai strategi desinkronisasi energi negara Baltik melalui lensa *Complex Interdependence*. Namun, terdapat beberapa area yang dapat menjadi peluang untuk bisa dijadikan penelitian di masa yang akan datang. Salah satu keterbatasannya adalah fokus waktu yang bersifat panjang dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, penelitian ini hanya mencakup sebagian kecil dari rencana yang akan dilakukan oleh negara-negara Baltik berpuluh-puluh tahun kedepan. Dengan memperbaharui pada setiap cakupan waktu, diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dan mengikuti perkembangan informasinya pula.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada strategi negara-negara Baltik. Studi lanjutan yang secara spesifik membahas tentang respons dan kontra strategi bagi rusia terhadap proses desinkronisasi yang dilakukan juga akan memberikan gambaran yang itu dari kedua sisi. Lalu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, oleh karena itu penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk melakukan analisis dan mengukur dampak konkret dari integrasi ini. Contohnya, analisis statistik terhadap stabilitas harga listrik di kawasan Baltik. Dengan mengeksplorasi ranah-ranah tersebut, pemahaman kita akan dinamika keamanan energi, interdependensi regional, serta strategi negara kecil yang menghadapi kekuatan besar dapat terus diperdalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. 2025. "Why have Baltic states unplugged from Russia's electricity grid?" Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/2/10/why-have-baltic-states-unplugged-from-russias-electricity-grid>.
- AST. 2024. "Elektroenerģijas tirgus apskats | AST." <https://www.ast.lv/en/electricity-market-review?year=2024&month=1>.
- Bajarūnas, Eitvydas. 2024. "Baltic Power Shows Way on Hybrid Threats." *CEPA*, Desember 9. <https://cepa.org/article/baltic-power-shows-way-on-hybrid-threats/>.
- Bajarūnas, Eitvydas. 2025. *Russia's Hybrid Warfare Tactics Target the Baltics*. Mei 27. <https://jamestown.org/program/russias-hybrid-warfare-tactics-target-the-baltics/>.
- Bakhtiar, Isti Fauziah, Elysia Griselda Maryyan, dan Dinillah Veronica Rambe. 2024. *Indonesia's Economic Diplomacy Strategy at the G20 as a Driver of Sustainable Energy Transition through Multilateral Partnerships*.
- BalticTimes, The. 2021. "Lithuania already has a synchronisation-ready link with Poland: Litgrid has completed the LitPol Link expansion project." November 15. [https://www.baltictimes.com/lithuania\\_already\\_has\\_a\\_synchronisation-ready\\_link\\_with\\_poland\\_litgrid\\_has\\_completed\\_the\\_litpol\\_link\\_expansion\\_project/](https://www.baltictimes.com/lithuania_already_has_a_synchronisation-ready_link_with_poland_litgrid_has_completed_the_litpol_link_expansion_project/).
- Bergmane, Una. 2020. "Fading Russian Influence in the Baltic States." *Orbis* 64 (3): 479–88. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2020.05.009>.
- Bloomberg. 2025. "Putin Going to War with NATO Would Cost World \$1.5 Trillion." *Bloomberg.Com*, Juni 23. <https://www.bloomberg.com/graphics/2025-russia-war-with-nato-cost-world-trillions/>.
- Bompard, Ettore, Shaghayegh Zalzar, Tao Huang, Arturs Purvins, dan Marcelo Masera. 2018. "Baltic Power Systems' Integration into the EU Market Coupling under Different Desynchronization Schemes: A Comparative Market Analysis." *Energies* 11 (8): 1945. <https://doi.org/10.3390/en11081945>.
- Carlson, Ewa Lazarczyk, dan Chloé Le Coq. 2022. *Can the Baltic States Do Without Russian Electricity?*
- Carnelian, Chikitta. 2017. "Kebijakan Energi Luar Negeri Rusia dalam Mempertahankan Pengaruh di Negara-Negara Baltik: Analisis Kebijakan Energi Gas pada Masa Pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin." *Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW*. <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/16179>.
- Carnelian, Chikitta, Daru Purnomo, dan Adrianus Bintang HN. 2017. *STRATEGI ENERGI VLADIMIR PUTIN DALAM MEMPERTAHANKAN DOMINASI RUSIA DI NEGARA-NEGARA BALTIK*.
- Cicchetti, Alayna. 2025. "Securing the Depths: NATO's Need for Regional Cooperation in Baltic Sea Infrastructure Defense." American University, April 24. <https://www.american.edu/sis/centers/transatlantic-policy/articles/20250424-securing-the-depths.cfm>.

- Cook, Ben. 2025. "BRELL Desynchronisation Assessment." *NATO ENSEC COE*, Februari 6. <https://www.enseccoe.org/publications/brell-desynchronisation-assessment/>.
- Defeuilley, Christophe. 2009. *PORTRAIT D'ENTREPRISE Gazprom*. <https://shs.cairn.info/revue-flux1-2009-2-page-126?tab=texte-integral>.
- Dewi, Rosita. 2013. "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan." *Jurnal Interdependence*.
- EBRD. 2025. "EBRD Supports Large-Scale Hybrid Solar Energy Rollout in Latvia." Agustus 1. <https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2025/ebrd-supports-large-scale-hybrid-solar-energy-rollout-in-latvia.html>.
- eegas. 2014. "Gazprom Pipelines." <https://eegas.com/fsu.htm>.
- Elletson, Harold. 2006. *Baltic Independence and Russian Foreign Energy Policy*.
- ENTSOE. 2019. "First milestone of Future Synchronous Connection of the Baltic Power System with Continental Europe." April 29. <https://www.entsoe.eu/news/2019/05/29/first-milestone-of-future-synchronous-connection-of-the-baltic-power-system-with-continental-europe/>.
- ENTSO-E. 2025a. "ENTSO-E Confirms Successful Synchronization of the Continental European Electricity System with the Systems of the Baltic Countries." Februari 9. <https://www.entsoe.eu/news/2025/02/09/entso-e-confirms-successful-synchronization-of-the-continental-european-electricity-system-with-the-systems-of-the-baltic-countries/>.
- ENTSO-E. 2025b. *Regional Investment Plan 2024 / Baltic Sea*. Juni.
- ENTSOE. t.t. "European Network of Transmission System Operators for Gas." Diakses 12 Juni 2025. <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/digital-building-blocks/sites/pages/viewpage.action?pageId=533365448>.
- European Commission. 2019. "Project of Common Interest: The Balticconnector Corridor: Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas (BEMIP)." [https://energy.ec.europa.eu/document/download/ddf3d09d-165a-4501-9bab-96ca5abe760e\\_en?filename=pci\\_factsheet\\_baltconnector\\_2017.pdf](https://energy.ec.europa.eu/document/download/ddf3d09d-165a-4501-9bab-96ca5abe760e_en?filename=pci_factsheet_baltconnector_2017.pdf).
- European Commission. 2022. "Projects of Common Interest in energy infrastructure in the Nordic and Baltic Sea region." European Commission, Desember. <https://circabc.europa.eu/ui/group/8f5f9424-a7ef-4dbf-b914-1af1d12ff5d2/library/8927a4cd-7479-415f-8bfb-ba0bee46c6d4/details>.
- European Commission. t.t. "Baltic Energy Market Interconnection Plan." Diakses 23 Februari 2025. [https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan_en).
- Fang, Songying, Amy Myers Jaffe, Ted Loch-Temzelides, dan Chiara Lo Prete. 2024. "Electricity Grids and Geopolitics: A Game-Theoretic Analysis of the Synchronization of the Baltic States' Electricity Networks with Continental Europe." *Energy Policy* 188 (Mei): 114068. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114068>.
- GAZ system. 2024. "Gas Transmission System Operators from the Baltic Sea Region Have Signed a Memorandum of Understanding to Accelerate the Development of Hydrogen Infrastructure." Gas Transmission System

- Operators from the Baltic Sea Region Have Signed a Memorandum of Understanding to Accelerate the Development of Hydrogen Infrastructure, Juni 17. <http://www.gaz-system.pl/en/hydrogen-market/news/17-06-2024-gas-transmission-system-operators-from-the-baltic-sea-region-have-signed-a-memorandum-of-understanding-to-accelerate-the-development-of-hydrogen-infrastructure.html>.
- Grigorjana, Ruzanna. 2025. "Baltic States Synchronise with Europe." *EUSBSR*, Maret 26. <https://eusbsr.eu/baltic-states-synchronise-with-europe/>.
- Grzegorzczak, Marek. 2020. "Baltic States Big Winners in Allocation of New EU Energy Infrastructure Funding." *Emerging Europe*, Oktober 2. <https://emerging-europe.com/analysis/baltic-states-big-winners-in-allocation-of-new-eu-energy-infrastructure-funding/>.
- Hartwell, Leon, dan Agne Rakstyle. 2025. *Energy Security in the Baltics: Perceptions in the midst of the Russia-Ukraine War*. LSE IDEAS. <https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/Research-Reports/2025-04-29-HartwellRakstyle-EnergySecBaltics-WEB.pdf>.
- Hodunova, Kateryna. 2024. "Baltic States to Complete Decoupling from Russian-Controlled Power Grid by Early 2025." *The Kyiv Independent*, Juli 16. <https://kyivindependent.com/baltics-inform-moscow-minsk-of-their-separation-from-russian-controlled-power-system/>.
- Houlton, Susan. 2009. "Shutting down – DW – 12/31/2009." *dw.com*, Desember 31. <https://www.dw.com/en/lithuania-shuts-down-last-reactor/a-5074094>.
- Ignitis Group. 2022. "Ignitis Group 2022 Annual Report." [https://old.ignitisgrupe.lt/sites/default/files/inline-files/Annual%20report%202022\\_0.pdf](https://old.ignitisgrupe.lt/sites/default/files/inline-files/Annual%20report%202022_0.pdf).
- Jansons, Leo. 2014. "Elimination of the Baltic 'Energy Island' and Its Importance for Further EU Market Integration in Sector of the Electric Energy." *Elektor*, Agustus 4. <https://www.elektormagazine.com/news/Elimination-of-the-Baltic--Energy-Island--and-its-Importance-for-Further-EU-Market-Integration-in-Sector-of-the-Electric-Energy>.
- Johnsen, Kevin. 2021. "Fast energy transition and potential challenges in the Baltics – Nordic Energy Research." <https://www.nordicenergy.org/article/fast-energy-transition-and-potential-challenges-in-the-baltics/>.
- Juanda, Imaddudin Ahmad, dan Hesti Rosdiana. 2022. *Kebijakan Energi Uni Eropa Setelah Serangan Rusia ke Ukraina Februari Tahun 2022*. 1 (4).
- Kardaś, Szymon. 2025. "Synch and swim: How escaping Russia's electricity grid can strengthen Baltic energy security." *ECFR*, Februari 7. <https://ecfr.eu/article/synch-and-swim-how-escaping-russias-electricity-grid-can-strengthen-baltic-energy-security/>.
- Keohane, Robert O., dan Joseph S. Nye. 2012. *Power and Interdependence*. 4. ed. Longman Classics in Political Science. Pearson.
- KN Energies. t.t. "Klaipėda LNG Terminal - KN." Diakses 2 Juli 2025. <https://www.kn.lt/en/our-activities/lng-terminals/klaipeda-lng-terminal/559>.
- Krūkle, Zanda. 2024. "Energising Independence: The Baltic Shift to Sustainable Autonomous Energy - Nordic Investment Bank." Februari 22.

- <https://www.nib.int/cases/energising-independence-the-baltic-shift-to-sustainable-autonomous-energy/>.
- Litgrid. 2023. "Baltic TSOs signed an agreement for synchronisation to take place in February 2025." Agustus 2. <https://www.litgrid.eu/index.php/news-events-/news/baltic-tsos-signed-an-agreement-for-synchronisation-to-take-place-in-february-2025-/32513>.
- Mahnitko, Anatolijs, Tatjana Lomane, Inga Zicmane, Timur Kuznecovs, dan Jurijs Silinevics. 2020. "Implementation of Integration Problem for Baltic Energy Systems into Continental Europe Energy." *2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON)*, November 5, 1–6. <https://doi.org/10.1109/RTUCON51174.2020.9316596>.
- Matthews, Carrington. 2020. "The Baltic States' Relations with Russia." *Global Insight: A Journal of Critical Human Science and Culture* 1 (1): 21–30. <https://doi.org/10.32855/globalinsight.2020.003>.
- O'Connor, Kevin. 2015. *The History of the Baltic States*. Second edition. The Greenwood Histories of the Modern Nations. Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, LLC.
- ORLEN. 2023. "ORLEN Group: effective diversification of gas imports." Maret 16. <https://www.orlen.pl/en/about-the-company/media/press-releases/2023/march-2023/ORLEN-Group-effective-diversification-of-gas-imports->.
- Pilot, Amelia. 2025. "Baltic States Grid Synchronization: Addressing Energy Threats in the Baltic Region." *Kleinman Center for Energy Policy*, Mei 9. <https://kleinmanenergy.upenn.edu/commentary/blog/baltic-states-grid-synchronization-addressing-energy-threats-in-the-baltic-region/>.
- Prime Ministers of the Baltic States. 2023. "JOINT DECLARATION OF THE PRIME MINISTERS OF THE BALTIC STATES ON THE ACCELERATED SYNCHRONISATION OF THE BALTIC STATES' ELECTRICITY NETWORKS WITH THE CONTINENTAL EUROPEAN NETWORK." Agustus 3. <https://static.lsm.lv/documents/1rn.pdf>.
- Publica, Res. 2022. "Литва выходит из соглашения БРЕЛЛ. Почему это так важно?" *Res Publica*, Juni 28. <https://ru.respublica.lt/litva-vyhodit-iz-soglashenija-brell>.
- Ratings, Scope. 2025. "Global Economic Outlook Mid-Year 2025 Macroeconomic Council (MEC)." Juni 20. <https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadstudy?id=92527091-01ef-4d0b-8aca-3085023b216d>.
- Santaella, Maria Isabel. 2025. "Power shift: How the Baltic Synchronisation strengthens Europe's energy security." *WindEurope*, Februari 10. <https://windeurope.org/newsroom/news/power-shift-how-the-baltic-synchronisation-strengthens-europes-energy-security/>.
- Tatarėlytė, Laura. 2025. "The Era of Russian Energy Manipulations Is Over." Februari 7. <https://www.freiheit.org/era-russian-energy-manipulations-over>.
- Teivāns-Treinovskis, Jānis, Nikolajs Jefimovs, Ruta Velika, dan Igors Trofimovs. 2023. "Legal Conditions of EU Energy Security." *Entrepreneurship and*

- Sustainability Issues* 10 (4): 39–47.  
[https://doi.org/10.9770/jesi.2023.10.4\(3\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2023.10.4(3)).
- Thomas, Matthew. 2021. “Securing Energy Supply in the Baltics.” Baltic Security Foundation. [https://balticsecurity.eu/securing\\_energy\\_supply\\_baltics/](https://balticsecurity.eu/securing_energy_supply_baltics/).
- Walidin, Warul, Saifullah, dan ZA Tabrani. 2015. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF & GROUNDED THEORY*.
- Wind, Baltic. 2024. “Baltic States Accelerate Offshore Wind Energy Initiatives Amidst Energy Security Concerns.” *Baltic Wind*, Mei 21.  
<https://balticwind.eu/baltic-states-accelerate-offshore-wind-energy-initiatives-amidst-energy-security-concerns/>.